

POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

ABDUL HAKIM

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten
abdulhakim@gmail.com

ABSTRAK

Politik merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara atau *nation-state* seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah lembaga pendidikan Islam yang telah menyejarah. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat dipisahkan dari kultur bangsa ini.

Kata kunci: politik, kebijakan, pendidikan, Islam

PENDAHULUAN

Politik merupakan hal yang tidak terlepas dari kekuasaan sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Politik memiliki sistem politik yang di dalamnya yang memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*). Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu Negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.¹

¹Ng. Philipus, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 104.

Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.² Dalam pengertian ini terdapat unsur yang mencerminkan sebuah politik yaitu; interaksi, pemerintah atau penguasa, masyarakat, keputusan, dan kebaikan bersama.

Setiap politik terdiri dari dua unsur, yaitu penguasa dan masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Proses menuju panggung politik bisa ditempuh atau dilakukan oleh siapa saja selama memiliki kapasitas. Politik tidak hanya dijalankan atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tetapi bisa juga dilakukan oleh para ulama. Ulama memiliki sumber daya yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi massa.

Politik merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara atau *nation-state* seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam.³

Sejak Islam masuk ke Indonesia, pendidikan Islam telah ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, karena melalui pendidikan Islam itulah, transmisi dan sosialisasi ajaran Islam dapat dilaksanakan dan dicapai hasilnya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.⁴ Telah banyak lembaga pendidikan Islam yang bermunculan dengan fungsi utamanya adalah

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1999), 1-8.

³ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011),. 3.

⁴ Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1985), 52.

memasyarakatkan ajaran Islam, di Sumatra Barat di jumpai surau, Rangkang dan Meunasah di Aceh, Langgar di Jakarta, Tajuk di Jawa Barat, pesantren di Jawa, dan seterusnya. Munculnya lembaga-lembaga tradisional ini tidak selamanya diterima baik oleh masyarakat, mengingat jauh sebelum itu telah berkembang pula agama-agama lain seperti Hindu, Budha, dan juga paham agama setempat dan adat istiadat yang tidak selamanya sejalan dengan ajaran Islam.

Menghadapi hal yang demikian itu para pendidik dan juru dakwah menggunakan berbagai strategi dan pendekatan, yaitu disamping menggunakan pendekatan kultural juga dengan pendekatan politis dan perkawinan. Melalui pendekatan yang demikian itu, Islam yang diajarkan tidak selamanya menampilkan corak seragam. Kenyataan inilah yang selanjutnya memperlihatkan alam Indonesia sebagai negara yang kaya dengan budaya, agama, adat istiadat dan lembaga pendidikan. Dalam proses sosialisasi ajaran Islam tersebut, para pendidik telah memainkan peranan yang amat signifikan dengan cara mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, hingga Perguruan Tinggi atau Universitas.

Secara kultural, pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah lembaga pendidikan Islam yang telah menyejarah. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat dipisahkan dari kultur bangsa ini.

Secara politis, jauh sebelum kemerdekaan RI, pemerintah kolonial Belanda dan Jepang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam yang Notabene diselenggarakan oleh umat Islam. Kontrol tersebut dimotivasi oleh pertimbangan politis bahwa umat Islam di Nusantara adalah komunitas yang ayoritas, sehingga mesti diakomodasi kepentingan politik dan edukasinya guna mengukuhkan legitimasi kekuasaan.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan politik pendidikan yang secara fungsional umat Islam mendapatkan manfaat atas kebijakan politik pendidikan pemerintah, terutama bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam.

Atas dasar ini lahir berbagai kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional yang memuat tentang relasi antara pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya lahir Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Jo. Nomor 12 tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut posisi pendidikan Islam mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh kepentingan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui hubungan politik dengan pendidikan, mengetahui kontrol negara terhadap pendidikan, serta mengetahui keterkaitan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Hubungan politik dan Pendidikan

Politik pendidikan atau *the politics of education* adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaian. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan

pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di Negara-Negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic* yang membahas hubungan antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

B. Kontrol Negara terhadap Pendidikan

Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia

sehingga program – program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa suatu Negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu system pendidikan yang memiliki kharakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak Negara yang menerapkan control yang sangat ketat terhadap program – program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh Negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemerintah adalah bagian dari Negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.

C. Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

1. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Zaman Belanda

Sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam menurut Rasi'in dalam Abduddin Nata setidaknya dapat dikategorikan ke dalam empat hal,⁵ yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan kemajuan dan kemampuan yang berkualitas bagi orang-orang Belanda.
2. Pendidikan diselenggarakan dengan mkasud untuk menghasilkan tenaga-tenaga atau pekerja yang murah untuk membantu kepentingan Belanda.

⁵ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II ,Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

3. Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan menanamkan misi Kristen dan mengkristenkan orang-orang pribumi.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk memelihara dan mempertahankan perbedaan sosial.

Dari kategori di atas dapat kita ketahui bahwasannya Kebijakan pemerintah Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri. Belanda membawa dan menyebarkan misi Kristen sekaligus menguasai bumi nusantara oleh sebab itulah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak mendukung keberlangsungan pendidikan Islam, diantaranya :

- a. Tahun 1882 pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden*. Berdasarkan nasihat nasihat badan inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama “Ordonansi Guru”.
- b. Tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan “Ordonansi Guru” kedua yang isinya mewajibkan bagi setiap guru agama untuk melaporkan diri pada pemerintah secara berkala. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah Kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di Negara ini.
- c. Tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan “Ordonansi Sekolah Liar” (*Wilde School Ordonantie*). Ordonansi ini berisi kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda.⁶

2. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Awal Kemerdekaan.

Urusan agama yang ada sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama yang pada masa penjajahan Belanda bernama resmi *Kantoor voor*

⁶ Engku. Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Inlandshe Zaken kemudian pada penjajahan Jepang bernama *Shumuka* setelah Indonesia mengganti nama Kementrian Agama dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946. Kementrian Agama juga mengurus bidang pendidikan yang berhubungan dengan agama. BP KNIP menyampaikan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan agama Islam, baik di lingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K). Di antara usulan itu adalah perbaikan kualitas pesantren dan madrasah, modernisasi pengajarannya dan diberikan bantuan. Setelah Kementerian Agama dibentuk dengan K.H. Wahid Ha-syim sebagai Menteri Agama, perhatian terhadap pesantren semakin bertambah. Siswa, kyai, dan pesantren semakin bertambah banyak dan pada akhir periode Orde Baru jumlah pesantren tercatat 8.376 buah.⁷

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1950 terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada Bab XII pasal 20 yang berbunyi:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

Kemudian tahun berikutnya ditandatangani kembali Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama Nomor: 1432/kat. Tanggal 20 Januari 1951 (Menteri Pendidikan), Nomor: K/1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), diatur peraturan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah, yaitu:

⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Cet. VI, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

3. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Orde Baru

Pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah. Sejumlah madrasah menjadi negeri dengan rincian, 358 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan status negeri, tanggung jawab pengelolaan menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan control atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif.

Pada 18 April 1972 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang “Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”. Isi keputusan ini menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
- b. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
- c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan khusus pegawai negeri.

Dan pada dua tahun berikutnya Kepres ini dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Kedua kebijakan ini menimbulkan reaksi umat Islam. Diantaranya adalah Musyawarah Kerja Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Lembaga ini meyakinkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan nasional. Menyinggung tentang madrasah itu, MP3A menegaskan bahwa “yang paling tepat disertai tanggung jawab itu ialah Departemen Agama, sebab Menteri

Agamalah yang lebih tahu tentang seluk beluk pendidikan agama bukan Menteri P&K atau menteri-menteri lain.

Dengan memperhatikan aspirasi tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus-menerus. Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai “Peningkatan mutu pendidikan madrasah”. Dan dilanjutkan dengan Presiden mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 yang isinya:

- a. Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedang tanggung jawab pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama.
- b. Untuk pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P&K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum.⁸ Bedanya, madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran agama Islam.

⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Posisi madrasah ini dipertegas kembali dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, bab IV pasal 11, ayat 6 tentang pendidikan keagamaan, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri, bahwa MI, MTs, dan MA masing-masing termasuk SD, SLTP, SMU yang berciri khas agama Islam dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tanggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan oleh Menteri Pendidikan kepada Menteri Agama, dan siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Apabila dalam satu kelas di suatu sekolah terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang siswa yang memeluk agama tertentu, pendidikan agama siswa yang bersangkutan wajib diberikan di kelas tersebut, sementara bagi siswa yang tidak memeluk agama yang sedang diajarkan pada saat berlangsungnya pelajaran agama di kelas itu, diberi kebebasan. Kurikulum dan bahan kajian yang diberikan di madrasah minimal sama dengan sekolah, di samping bahan kajian lain yang dinerikan pada madrasah tersebut. Dengan keluarnya petunjuk pelaksanaan tersebut, ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional memang dapat diatasi. Petunjuk pelaksanaan itu mengandung perbedaan yang cukup mendasar dengan Kepres dan Inpres tersebut. Disitu ditegaskan bahwa hak dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama.

4. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Reformasi

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk

dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni.

Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Saat rezim Orde Soeharto tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim Soeharto menggulirkan gagasan reformasi, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak.

Selanjutnya pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan dengan tegang adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama," (Pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3.

Perjalanan kebijakan pendidikan Indonesia belum berakhir, pada tahun 2004 pemerintah menetapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kehadiran Kurikulum berbasis kompetensi pada mulanya menumbuhkan

harapan akan memberi keuntungan bagi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode Cara belajar siswa Aktif (CBSA). Namun dari sisi mental maupun kapasitas guru tampaknya sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual, ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan Ujian Nasional, sehingga KBK segera diganti dan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kementerian Agama RI di tahun 2010-2014 menetapkan 5 kebijakan yaitu:

- a. peningkatan kualitas kehidupan beragama
- b. peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
- c. peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- d. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
- e. perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁹

Kata pesantren yang berasal dari kata santri dengan mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an. Kata tersebut mengandung arti asrama tempat tinggal santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Sumber yang lain menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa Inda Chasti dari akar kata Shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.

Kata pesantren sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan kata “pondok” menjadi “pondok pesantren”. Ditinjau dari segi

⁹ Iskandar Engku, Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

bahasa, kata pondok dengan kata pesantren tidak ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya karena kata pondok adalah berasal dari bahasa Arab *funduq* yang artinya hotel dan pesantren. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya suatu pendidikan agama Islam yang telah melembaga sejak zaman dahulu. Jadi pada hakikatnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam.

Dalam buku yang berjudul *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren* yang dikeluarkan oleh Departemen Agama halaman 9 mendefinisikan pondok pesantren sebagai :

“Lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non-klasikal dimana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok dalam pesantren tersebut.”

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketentuan diatas menempatkan pendidikan agama pada posisi yang amat strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Pondok pesantren merupakan bagian pendidikan keagamaan yang secara historis telah mampu membuktikan secara kongkrit dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, secara filosofis maupun historis dan secara yuridis, pondok pesantren pun dengan tegas tercakup dalam ketentuan-ketentuan yang ada

dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu dapat dilihat dalam rincian berikut:

1. Dari segi jalur pendidikan, pondok pesantren dan madrasah diniyah dapat dimasukkan kedalam jalur formal dan non formal, karena pondok pesantren dan madrasah diniyah ada yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan ada yang tidak. Pondok pesantren dan madrasah diniyah yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan termasuk dalam jalur pendidikan formal, sedang yang tidak berjenjang dan tidak berkelanjutan termasuk dalam jalur pendidikan non formal.
2. Dari segi pendidikan, pondok pesantren dan madrasah diniyah termasuk jenis pendidikan keagamaan, yaitu berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.
3. Dari segi jenjang pendidikan, dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda, pondok pesantren yang berjenjang dapat dikelompokkan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Posisi strategis pondok pesantren dan madrasah diniyah dalam sistem pendidikan nasional itu juga memberikan peranan yang penting dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yaitu :

1. Peranan Instrumental. Upaya pendidikan secara nasional, tak pelak lagi memerlukan sarana-sarana sebagai media untuk mengefektifkan tujuan-tujuannya. Sarana-sarana itu, selain dibentuk secara formal seperti halnya gedung sekolah, juga dibentuk secara informal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada umumnya merupakan kreasi murni para kyai-ulama dalam usaha menciptakan sarana pendidikan. Dalam tataran inilah, peranan pondok pesantren sebagai alat atau instrumen pendidikan nasional.

2. Peranan Keagamaan. Pendidikan pondok pesantren pada hakikatnya tumbuh dan berkembang sepenuhnya berdasarkan motivasi agama. Lembaga ini dikembangkan untuk mengefektifkan usaha penyiaran dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Dalam pelaksanaanya, pendidikan pondok pesantren melakukan proses pembinaan pengetahuan, sikap dan kecakapan yang menyangkut segi keagamaan. Tujuan intinya adalah mengusahakan terbentuknya manusia berbudi luhur (al-akhlaqul kariamah) dengan pengalaman keagamaan yang konsisten (istiqomah). Pendidikan Nasional sendiri bertujuan, untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Untuk kepentingan ini pendidikan agama dikembangkan secara terpadu, baik melalui sekolah umum maupun madrasah.
3. Peranan Memobilisasi Masyarakat. Dalam kenyataannya, usaha-usaha pendidikan nasional secara formal belum mampu menampung seluruh aktifitas pendidikan masyarakat Indonesia, di samping karena ada sebagian masyarakat yang kurang kesadarannya akan pentingnya pendidikan (sekolah), juga karena memang sarananya masih sangat terbatas, terutama di pedesaan. Bagi sebagian masyarakat masih terdapat kecenderungan yang memberikan kepercayaan pendidikan putra-putrinya hanya kepada pondok pesantren.
4. Peranan Pembinaan Mental dan Keterampilan. Dalam sistim pendidikan Nasional, tujuannya adalah menciptakan manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan di pondok pesantren diselenggarakan tidak hanya pada pendidikan keagamaan

semata, melainkan juga dikembangkan pembinaan mental dan sikap para santri untuk hidup mandiri, meningkatkan keterampilan dan berjiwa entrepreneurship. Karena di pondok pesantren dikembangkan juga unit usaha atau pembinaan yang diselenggarakan dalam memenuhi tuntutan zaman dimana mereka, para santri, setelah lulus dan keluar pondok pesantren memiliki sesuatu keterampilan tertentu yang dapat dikembangkan secara mandiri sebagai bekal hidupnya.

Pada dasarnya fungsi pesantren adalah lembaga yang bertujuan mencetak muslim agar menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata ditujukan untuk mengharap keridhaan Allah.

Peranan pendidikan pesantren dalam pelaksanaan pendidikan nasional dapat lihat dalam kaitannya sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Pesantren merupakan lembaga yang berfungsi melaksanakan pendidikan berdasarkan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Dengan fungsi khusus yang dibawa oleh sistem pendidikan ini, pendidikan nasional akan menunjukkan dinamikanya secara mantap untuk kepentingan ini.

Walaupun peranan penting yang diberikan pondok pesantren terhadap pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia, tetapi perhatian negara terhadap pondok pesantren masih kurang baik, apalagi pondok pesantren yang tidak menyesuaikan diri dengan jenjang dan sistem pendidikan formal. Rendahnya perhatian negara terhadap pondok pesantren tampak dalam ketidakjelasan kedudukan dan pengakuan terhadap lulusan pondok pesantren. Santri yang telah tamat pendidikan di pondok pesantren tidak memiliki civil effect sebagaimana tamatan pendidikan formal, padahal dari segi kualitas penguasaan materi yang dipelajari lulusan pesantren pun tidak kalah dengan siswa yang mengikuti pendidikan formal. Bahkan mungkin dalam aspek-aspek

tertentu lulusan pesantren memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh lulusan pendidikan formal, misalnya, kuatnya sikap mandiri, ketaatannya dalam beribadah, serta akhlaq yang lebih terjamin.

Pondok pesantren masuk kedalam sistim pendidikan nasional berarti seluruh yang dilakukan oleh pondok pesantren yang jelas-jelas melaksanakan pendidikan secara komprehensif dan holistik untuk kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa namun belum masuk hitungan dalam substansi pelayanan /pembinaan yang tergambar dalam rendahnya alokasi anggaran dan bantuan kependidikan lainnya bagi pondok pesantren, seperti pembiayaan penyiapan saran dan prasarana pembelajaran, pembiayaan proses pembelajaran, tenaga kependidikan dan pengelolaan.

PENUTUP

Kondisi Pendidikan Islam pada masa penjajahan cukup banyak mendapat tekanan dari pihak penjajah namun dengan semangat jiwa patriotisme dan semangat jihad di jalan Allah yang dimiliki oleh para pejuang Islam mampu melawan penjajah dengan berbagai cara termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam sesuai dengan organisasi keagamaan yang telah dibentuk masing-masing tokoh pendidikan tersebut. Latar belakang munculnya pendidikan Islam di Indonesia akibat adanya desakan penjajah untuk membatasi gerakan keagamaan dalam bidang pendidikan, di samping itu juga munculnya gerakan pembaharuan pemikiran keagamaan dari tokoh Islam.

Pendidikan Islam yang dalam hal ini dapat diwakili oleh pendidikan meunasah atau dayah, surau, dan pesantren diyakini sebagai pendidikan tertua di Indonesia. Pendidikan ketiga institusi di atas memiliki nama yang berbeda, akan tetapi memiliki pemahaman yang sama baik secara fungsional, substansial, operasional, dan mekanikal. Secara fungsional trilogi sistem pendidikan tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menggembelng

mental dan moral di samping wawasan kepada para pemuda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Sebelum masuknya penjajah Belanda, sistem pendidikan pribumi tersebut berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan agama Islam yang berlangsung secara damai, ramah, dan santun. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan bukti bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan sesuai model pendidikan Islam dengan nurani masyarakat dan bangsa Indonesia saat itu

Kehidupan masyarakat terasa harmonis, selaras, dan tidak saling mendominasi. Hanya saja sejak masuknya bangsa penjajah baik Spanyol, Portugis, dan Belanda dengan sifat kerakusan akan kekayaan dan materi yang luar biasa menjadikan masyarakat Indonesia tercerai berai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara,
- Engku. Zubaidah. 2004, *Sejarah Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Cet. VI, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Iskandar Engku, Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masykuri Abdillah, 2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Ng. Philipus, 2004. *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramlan Surbakti, 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Syafi'i Maarif, 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta: LP3ES.

KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA

Asep Imam Munandar

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten

asepimammunandar@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan memiliki ruang untuk melakukan kritik atas kekuasaan yang menyeleweng, dan politik kita harus membuka pandangan kita bahwa politik itu sebagai suatu seni yang memungkinkan sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Maka ketika kita niatan, cara, atau tujuan berpolitik itu baik, politik bukanlah sesuatu yang kotor, justru mulia, baik, natural, dan alamiah sebagai bentuk kemanusiaan dari manusia sebagai individu karena setiap orang yang hidup didunia memiliki keinginan, harapan, impian. politik dan pendidikan sama-sama berkaitan dengan urusan manusia hidup didunia, sama-sama sebagai salah satu alat atau jalan manusia untuk mencapai tujuannya, dan manusia sama sekali tidak bisa dikatakan apolitis dan tidak berpendidikan secara total. Manusia sekecil apa pun tetap berpolitis dan berpendidikan. Perbedaannya, politik lebih berkaitan dengan pencapaian posisi manusia dalam wilayah atau sebuah kekuasaan, baik itu skala besar ataupun skala kecil, sementara pendidikan lebih pada pencapaian manusia memperoleh pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan untuk persiapan hidup kedepan atau terjun dalam masyarakat yang lebih luas.

Kata kunci: kebijakan, politik, pendidikan, Indonesia

PENDAHULUAN

Ketika kita masih berada didalam tingkatan orang awam dan membatasi pengertian pendidikan, kita hanya mengetahui bahwa pendidikan berkaitan dengan sekolah, buku, belajar, ujian, dan uang jajan lintas ijazah. Kemudian dipihak lain kita hanya membatasi kata *politik* sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan kekuasaan, dan kekuasaan digolongkan dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi (golongan atas), dan kemudian kita juga membatasi kata politik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kotor, tipu

muslihat, permainan licik yang dilakukan oleh para politikus, pemegang kekuasaan disebuah wilayah, dan tidak ada nilai moralnya sama sekali kecuali yang ada dipikiran kita hanyalah pikiran negatif semua.

Dan ketika kita masih memberikan batasan pada kedua pengertian tersebut maka , pendidikan dan politik itu tidak akan pernah menyatu, tentu saja kita menjadikan pendidikan dan politik sebagai layaknya air dan minyak, tetapi apakah realitasnya demikian ? apakah kita tidak bisa melihat bagaimana para pemegang kekuasaan di Indonesia adalah kebanyakan orang-orang yang berasal dari lulusan sebuah pendidikan ,baik pendidikan negeri, swasta, maupun pendidikan alternative?

Dari situlah kita harus menyadari bahwa pendidikan itu memiliki daya dan ruang kekuasaan. Pendidikan memiliki ruang untuk melakukan kritik atas kekuasaan yang menyeleweng, dan politik kita harus membuka pandangan kita bahwa politik itu sebagai suatu seni yang memungkinkan sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Maka ketika kita niatan, cara, atau tujuan berpolitik itu baik, politik bukanlah sesuatu yang kotor, justru mulia, baik, natural, dan alamiah sebagai bentuk kemanusiaan dari manusia sebagai individu karena setiap orang yang hidup didunia memiliki keinginan, harapan, impian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan dari makalah ini sebagai berikut: mengetahui pengertian politik dan pendidikan, mengetahui kebijakan politik pendidikan di Indonesia, serta mengetahui peran politik pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Politik dan Pendidikan

Menurut Roger F.Soltau dalam *introduction to Politics* , pengertian politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Menurut J. Barent dalam *ilmu Politika*, pengertian politik yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan Negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan juga mempelajari Negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata politik diartikan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintahan, dan dasar-dasar pemerintahan.
- b. Segala urusan dan tindakan, kebijakan, dan siasat.
- c. Kebijakan, cara bertindak didalam menghadapi masalah tertentu.

Lalu sekarang kita berarilah pada pengertian pendidikan, pendidikan didalam Kamus Bahasa Arab, ada beberapa istilah yang biasa dipergunakan dalam pengertian pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. **Ta'lim**, terdapat dalam QS Al-Baqarah (2):31 “Dan Allah mengajarkan kepada Adam segala nama, kemudian ia berkata kepada malaikat, ‘beritahukanlah Aku semua nama-nama itu jika kamu benar’”.
- b. **Tarbiyah**, dalam QSAI-Isra'(17):24 “... wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidiku di waktu kecil.
- c. **Ta'dib**, terdapat dalam salah satu hadit Nabi, “ Allah mendidiku, maka Dia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan.

Kemudian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Jamil Shaliba dari lembaga bahasa Arab Damaskus mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan, yaitu pengembangan fungsi-fungsi psikis melalui latihan sehingga mencapai kesempurnaannya sedikit demi sedikit.

Menurut M. J Langeveld mendefinisikan bahwa pendidikan adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju kedewasan dan kemandirian.

Menurut Kingsley Price mengemukakan pendidikan ialah proses ketika kekayaan budaya nonfisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang dewasa.

Dari beberapa pengertian tersebut , kita mendapati persamaan dan perbedaan antara politik dan pendidikan. Persamaannya, politik dan pendidikan sama-sama berkaitan dengan urusan manusia hidup didunia, sama-sama sebagai salah satu alat atau jalan manusia untuk mencapai tujuannya, dan manusia sama sekali tidak bisa dikatakan apolitis dan tidak berpendidikan secara total. Manusia sekecil apa pun tetap berpolitis dan berpendidikan. Perbedaannya, politik lebih berkaitan dengan pencapaian posisi manusia dalam wilayah atau sebuah kekuasaan, baik itu skala besar ataupun skala kecil, sementara pendidikan lebih pada pencapaian manusia memperoleh pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan untuk persiapan hidup kedepan atau terjun dalam masyarakat yang lebih luas.

Namun ini harus dibedakan dengan pendidikan politik pendidikan yang pengertian dan wilayahnya sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bagi perannya didunia politik.
- b. Pendidikan politik berorientasi pada bagaimana peserta didik menjadi manusia yang melek politik.
- c. Pendidikan politik lebih banyak berbicara mengenai usaha untuk “memellekpolitikkan” peserta didik bisa dicapai secara efektif, misalnya saja tentang sistem pengajaran, metode pengajaran, kurikulum pendidikan, dan sebagainya.

- d. Pendidikan politik lebih banyak berbicara mengenai sejauh mana sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga Negara, pemilu dan sebagainya.
- e. Pendidikan politik setara pengertiannya dengan pendidikan ekonomi, pendidikan agama, dan sebagainya

2. Kebijakan Politik Pendidikan di Indonesia

Kata kebijakan merupakan bentuk turunan dari kata bijak yang memiliki awalan ke dan akhiran an. Di dalam KBBI (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia), kata bijak memiliki arti selalu menggunakan akal budinya, mahir, pandai dan pandai bercakap-cakap. Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai policy yang berarti plan of action (rencana kegiatan) atau statemen of aims (pernyataan yang diarahkan. Adapun yang dimaksud kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan. Politik adalah segenap pengetahuan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan; segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain.

Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imran dari *Carter V. Good* bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.

Kebijakan bisa diartikan layaknya pengertian kurikulum, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Secara Etimologis , kurikulum merupakan terjemahan dari kata *curriculum* berasal dari bahasa latin *currere* yang berarti cepat, maju dengan cepat, merambat, tergesa-gesa, menjelelahi, menjalani, dan berusaha untuk. (Hasibuan, 1979). *Currere* berasal dari kata *cursus* yang lazim diindonesiakan menjadi “kursus”. Jika dikaitkan dengan kata lain, misalnya *vitae* ,bisa berarti riwayat atau perjalanan. Dengan demikian, *curriculum vitae* berarti riwayat hidup (Echols, 1984).

Didalam sejarah pendidikan di Indonesia, pada rentang waktu tahun 1945-1949 dikeluarkan kurikulum 1947. Pada tahun 1950-1961 ditetapkan kurikulum 1952. Kurikulum terakhir pada masa Orde Lama adalah Kurikulum 1964. Masa Orde Baru lahir empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya, muncul kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru yakni Kurikulum 1994. Kurikulum itu menjadi Kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh Orde Baru.

Pada Masa Era reformasi , muncul Kurikulum 2004 yang dikenal dengan nama kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pada tahun 2006 dilengkapi dengan standar isi dan standar kompetensi (sisko) yang memandu sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Dari perjalanan sejarah kurikulum nasional tersebut A. Fery T. Indarto mencermati bahwasanya penyusunan kurikulum yang silih berganti di Indonesia itu menunjukkan betapa kekuasaan ikut campur terlalu dalam pada persoalan pendidikan. Oleh karenanya ia berkesimpulan bahwa kurikulum yang berlaku dalam suatu Negara , termasuk Indonesia , sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan.

Sampai sejauh ini, pendidikan di Indonesia menggunakan satu kurikulum, yaitu kurikulum nasional yang dipakai sebagai acuan tunggal. Semua lembaga pendidikan formal dinegeri ini, baik di kota besar, pelosok gunung, maupun dipinggiran pantai, mempunyai kurikulum sama. Oleh karenanya, proses pendidikan yang diterapkan adalah dalam upaya membentuk keseragaman berpikir. Melalui proses pendidikan nasional, generasi muda Indonesia dibentuk oleh sistem pendidikan yang mengacu kepada politik etatisme.

3. Peran Politik Pendidikan

a. Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan adalah *“Leadership is an attempt at influencing the activities followers through the communication process toward the attainment of some goals”* Gibson et.al (1985). Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota lembaga organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.

Dalam kepemimpinan visioner, visi menjadi bagian penting dalam membangun organisasi, kepemimpinan yang efektif, mempunyai rencana yang matang dan berorientasi penuh pada hasil, mengadopsi visi-visioner baru yang menantang dalam menetapkan arah baru organisasi yang lebih baik. Dalam kepemimpinan visioner, pemimpin adalah juru bicara visi, pemimpin adalah agen perubahan bagi visi, dan pemimpin sebagai pelatih bagi visi. Kepemimpinan visioner = Tujuan bersama + orang-orang yang diberdayakan + perubahan organisasional yang tepat + pemikiran strategis.

Tidak semua tujuan dapat disebut visi, karena visi adalah tujuan yang memiliki persyaratan tertentu. visi hendaknya dapat menjadi acuan pemimpin dan para pengikutnya kearah tertentu untuk masa mendatang dan

dapat memberikan motivasi dalam melakukan perubahan. Lebih lanjut Wirawan (2002: 118) mengemukakan bahwa visi adalah apa yang diimpikan, keadaan masyarakat yang diciptakan, apa yang ingin dicapai oleh pemimpin dan pengikutnya dimasa yang akan datang. Sementara Bennis dan Nanus (1985: 80) menerapkan visi sebagai *“mental image of possible and desirable future state of the organization; a vision always refers to a future state a condition that does not presently exist and never existed before. Wish a vision, the leader provides the all important bridge from the present to the future of the organization”*.

Visi bukan hanya untuk kepentingan pemimpin melainkan juga para pengikutnya, oleh karena itu dalam menciptakan visi seorang pemimpin dapat melakukannya dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penelitian sejarah perkembangan masyarakat atau mungkin melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait.

Senge (1995) menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kedudukan dan peran kritikal, karena ia sebagai desiner, guru dan sekaligus sebagai pramugara. Oleh karena itu, pemimpin berkewajiban memiliki sifat visioner terhadap masa depan sehingga kepemimpinan yang akan ia tampilkan bersifat visioner pula. Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang mampu melihat masa depan dan berbeda dengan kepemimpinan modern. Konsep kepemimpinan menurut Burt dan Nanus (2000) mengandung kemampuan-kemampuan pemimpin sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih.

Pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Disaat organisasi sedang mengalami kebingungan menghadapi beragam perubahan dan struktur baru, pemimpin visioner tampil sebagai pelopor penentu arah yang akan dituju melalui pikiran-pikiran yang cerdas dan mengarahkan perilaku-perilaku bergerak menuju arah yang dikehendaki.

Kedua, pemimpin sebagai agen perubahan. Pemimpin visioner bertanggung jawab untuk merangsang perubahan lingkungan internal, ia

tidak nyaman dengan situasi organisasi yang statis dan status quo, ia memimpikan kesuksesan organisasi melalui gagasan-gagasan baru yang memicu kinerja dan menerima tantangan dengan menerjemahkannya kedalam agenda kerja yang jelas dan rasional.

Ketiga, pemimpin sebagai juru bicara. Pemimpin visioner tidak saja memiliki kemampuan meyakinkan orang dalam kelompok internal, tetapi juga kemampuan memperluas aksesibilitas pada lingkungan eksternal untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan keunggulan visi organisasi. Pemimpin visioner adalah seorang negosiator utama dan ulung dalam hubungan dengan organisasi lain atau hierarki yang lebih tinggi.

Keempat, pemimpin sebagai pelatih. Pemimpin visioner adalah pemberi teladan, pemberi semangat, pembangun rasa percaya diri, dan pemberi penghargaan atas keberhasilan orang lain, ia mampu mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan bekerjasama dengan orang-orang untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan visinya.

Perbedaan utama antara pemimpin dan manajer terletak pada visinya. Kalau seorang pemimpin selalu mempunyai visi, sedangkan seorang manajer tidak selalu mempunyai visi. Yang dimaksud dengan visi adalah apa yang diimpikan

b. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan Transformasional merupakan model kepemimpinan bagi seorang pemimpin yang cenderung untuk memberikan motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitikberatkan kepada perilaku untuk membantu transformasi antara individu dengan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional, meliputi:

1. Charisma/ Idealized influence
2. Inspirational Motivation

3. Intellectual Stimulation

4. Individualized Consideration

Kepemimpinan transformational muncul dilatarbelakangi oleh pola pikir ahli manajemen yang sudah berwawasan cukup baik dalam mengidentifikasi konsep manajemen mutakhir. Burn (1978) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformational sebagai suatu proses yang pada dasarnya “para pemimpin dan pengikut saling meneikan diri ketingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi”. Pemimpin transformational memiliki visi yang jelas, memiliki gambaran holistic yang jelas tentang bagaimana organisasi dimasa depan ketika semua tujuan dan sasarannya telah tercapai. Kepemimpinan Transformational dapat dipandang secara makro dan mikro. Jika dipandang secara mikro kepemimpinan transformational merupakan proses saling mempengaruhi antar individu, sementara secara makro merupakan proses memobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem social dan kelembagaan.

Kepemimpinan transformational dikemukakan untuk menjawab tantangan zaman yang penuh dengan perubahan. Zaman yang dihadapi saat ini bukan zaman ketika manusia menerima segala apa yang menyimpannya, tetapi zaman dimana manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang diberikannya secaa kemanusiaan. Bahkan dalam terminologinya motivasi maslow, manusia di era ini adalah manusia yang memiliki keinginan mengaktualisasi dirinya. Yang berimplikasi pada bentuk pelayanan dan penghargaan terhadap manusia itu sendiri. Kepemimpinan transformational tidak saja didasarkan pada kebutuhan akan penghargaan diri, tetapi menumbuhkan kesadaran pad pemimpin untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kajian perkembangan manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, kinerja, dan perumbuhan organsiasi adalah sisi yang paling mempengaruhi. Menurut Burn (1978) menjelaskan kepemimpinan

transformational sebagai suatu proses yang pada dasarnya “para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ketingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Para pemimpin adalah orang yang sadar akan prinsip perkembangan organisasi dan kinerja manusia sehingga berupaya mengembangkan segi kepemimpinannya secara utuh melalui pemotivasian terhadap staf dan kemanusiaan bukan didasarkan atas emosi seperti misalnya keserakahan, kecemburuan atau kebencian.

Pemimpin transformational adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh kedepan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini tetapi di masa mendatang. Oleh karena itu, pemimpin transformational adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner. William B. Catetter (1996), mengaitkan administrasi pendidikan dengan mengembangkan struktur social yaitu “educational administration is a social process that place within the context of social system”.

Berdasarkan uraian diatas, menurut Nurdin disimpulkan bahwa fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengalokasikan dan menintegrasikan peranan maupun fasilitas guna tercapainya tujuan sistem pendidikan. sedangkan secara operasional, merupakan proses mengatur hubungan manusia dengan manusia yang ada dalam sistem pendidikan tersebut. Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan demikianlah pentingnya kedudukan administrasi pendidikan sehubungan dengan pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Inilah sekelumit kapasitas kepemimpinan yang dielaborasi melalui pendekatan dan tindakan kedua gaya dan model sangat berperan dengan cara menampilkan keunggulan bertindak sesuai dengan kaidah “visionary leadership” dan “Transformational leadership” yang diwujudkan melalui fungsi dosen sebagai tenaga akademik di suatu perguruan tinggi.

4. Perkembangan Politik Pendidikan di Indonesia

Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik, dan kesadaran politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.

Ada empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :

1. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode perkembangan, yaitu :

1. Periode pertama adalah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung hingga pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai – nilai agama dan pembangunan keterampilan hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh tokoh – tokoh agama.
2. Periode kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1800an hingga tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan colonial dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah colonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan

pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para pekerja yang dapat dieksploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial.

3. Periode ketiga adalah periode pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai – nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan dunia pendidikan pada masa periode ini adalah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal.
4. Periode keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai – nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.
5. Periode kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrument pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organisasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Karena focus utama pembangunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi.
6. Periode keenam adalah periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga penataan system pendidikan nasional menjadi menu utama. Dengan menelusuri prinsip – prinsip

penerapan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan terkait.

PENUTUP

Pengertian kebijakan adalah layaknya kurikulum yakni seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Peran Politik Pendidikan terdapat dua bagian:

1. Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan adalah *“Leadership is an attempt at influencing the activities followers through the communication process toward the attainment of some goals”* Gibson et.al (1985). Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota lembaga organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.

2. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan Transformasional merupakan model kepemimpinan bagi seorang pemimpin yang cenderung untuk memberikan motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitikberatkan kepada perilaku untuk membantu transformasi antara individu dengan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional, meliputi:

1. Charisma/ Idealized influence
2. Inspirational Motivation
3. Intellectual Stimulation

4. Individualized Consideration

Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik, dan kesadaran politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta, 2011. 15.
- Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta, 2011. 16.
- Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta, 2011. 165-166.
- Abd. Rachman Assagaf, *Internationalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005.
<http://www.scribd.com/doc/2058421/politik-indonesia>

KERJASAMA DAN KOMPETENSI UNTUK MENINGKATKAN MORAL KELOMPOK

Asep Saya Hidayatullah

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten

Email: asepsayahidayatullah@gmail.com

Abstrak

Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan disegala bidang. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman tentang dasar dan tujuan pendidikan secara mendalam. Apabila kita telah memahami dasar dan tujuan pendidikan, maka kita bisa memajukan pendidikan secara nasional. Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan Islam adalah usaha merubah tingkah laku individu di dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses pendidikan. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.

Kata kunci: kejasama, kompetensi, moral, kelompok

PENDAHULUAN

Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang Sisdiknas No 2 tahun 1989 bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pembimbing, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Peningkatan mutu pendidikan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bangsa yang ingin maju. Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang bermutu dapat menunjang pembangunan disegala bidang. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman tentang dasar dan tujuan pendidikan secara mendalam . Apabila kita telah memahami dasar dan tujuan pendidikan, maka kita bisa memajukan pendidikan secara nasional.

Dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan itupun akan menentukan kearah mana anak didik dibawa. Untuk itu maka kita harus benar-benar memahami apa saja dasar pendidikan dan tujuan yang nantinya bisa dicapai.

Selain itu pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah SWT, karena orang semakin banyak mengerti tentang dasar-dasar Ilmu pendidikan Islam maka kemungkinan besar mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti akan terciptanya seorang hamba yang beriman. Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan Islam adalah usaha merubah tingkah laku individu di dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses pendidikan.

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mencapai suatu tujuan, tujuan pendidikan akan menentukan kearah mana peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT

agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan

Pendidikan berasal Bahasa Arab dari kata Tarbiyah, dengan kata kerja Rabba yang memiliki makna mendidik atau mengasuh, Jadi pendidikan dalam Islam adalah bimbingan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan juga dari Bahasa Yunani dari kata Pedagogi yaitu dari kata “paid” artinya anak dan “agos” artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai “ (the art and science of teaching children)”

Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktifitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan dan pandangan hidup yang kokoh dan tidak berubah. Kalau nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang dijadikan dasar pendidikan itu bersifat relatif dan temporal, maka pendidikan akan mudah terombang ambing.

Pakar-pakar pendidikan mendefinisikan pendidikan adalah sebagai berikut: Langveld Pendidikan adalah setiap usaha pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

- 1) Menurut Ahmad Fuad al Ahwaniy : “Pendidikan adalah pranata yang bersifat sosial yang tumbuh dari pandangan hidup tiap masyarakat. Pendidikan senantiasa sejalan dengan pandangan falsafah hidup masyarakat tersebut, atau pendidikan itu pada hakikatnya mengaktualisasikan falsafah dalam kehidupan nyata.” Menurut Ali Khalil

Abul Ainain : “Pendidikan adalah program yang bersifat kemasyarakatan, oleh karena itu, setiap falsafah yang dianut oleh suatu masyarakat berbeda dengan falsafah yang dianut masyarakat lain sesuai dengan karakternya, serta kekuatan peradaban yang memengaruhinya yang dihubungkan dengan upaya menegakkan spiritual dan falsafah yang dipilih dan disetujui untuk memperoleh kenyamanan hidupnya. Makna dari ungkapan tersebut ialah bahwa tujuan pendidikan diambil dari tujuan masyarakat, dan perumusan operasionalnya ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan disekitar tujuan pendidikan tersebut terdapat atmosfer falsafah hidupnya. Dari keadaan yang demikian itu, maka falsafah pendidikan yang terdapat dalam suatu masyarakat lainnya, yang disebabkan perbedaan sudut pandang masyarakat, serta pandangan hidup yang berhubungan dengan sudut pandang tersebut.

- 2) Menurut Muhammad Athiyah al Abrasyi : “Pendidikan Islam tidak seluruhnya bersifat keagamaan, akhlak, dan spiritual, namun tujuan ini merupakan landasan bagi tercapainya tujuan yang bermanfaat. Dalam asas pendidikan Islam tidak terdapat pandangan yang bersifat materialistis, namun pendidikan Islam memandang materi, atau usaha mencari rezeki sebagai masalah temporer dalam kehidupan, dan bukan ditujukan untuk mendapatkan materi semata-mata, melainkan untuk mendapatkan manfaat yang seimbang. Di dalam pemikiran al Farabi, Ibnu Sina, Ikhwanul as Shafa terdapat pemikiran, bahwa kesempurnaan seseorang tidak akan tercapai, kecuali dengan mensinergikan antara agama dan ilmu.”
- 3) John Dewey Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.

- 4) J.J Rousseau Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat kita dewasa nanti.
- 5) Carter V. Good pendidikan adalah seni,praktek, atau profesi mengajar. Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid, dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan.

Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu Metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang Sisdiknas No 2 tahun 1989 bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan. Pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki.

Kekuatan sprirual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

B. Dasar Pendidikan

Yang dimaksud dengan dasar disini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung. Maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan, dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan disekolah-sekolah atau dilembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat yang tidak punya dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang menggembirakan

Adapun dasar pendidikan Islam dapat diketahui dari firman Allah SWT:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa : 59).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa seluruh urusan umat Islam wajib berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Dengan demikian dasar dari pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunah. Walaupun demikian, kedua sumber utama tersebut hanya mengandung prinsip-prinsip pokok saja, sehingga pendidikan Islam tetap terbuka terhadap unsur ijtihad dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunah sebagai nilai utama.

Ahmad D. Marimba mengemukakan sumber dasar Islam adalah firman Allah SWT dan sunah Rosulullah SAW. Sedangkan Zakiah Daradjat mengungkapkan landasan pendidikan Islam itu terdiri dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang dapat dikembangkan dengan ijtihad. Ijtihad digunakan karena semakin banyaknya permasalahan yang berkembang sekarang ini dalam bidang pendidikan, serta diperlukannya pemikiran-pemikiran baru yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari uraian di atas maka dapat diambil pemahaman bahwa dasar pendidikan Islam ada dua, yaitu :

1. Dasar Pokok

Dasar pokok dari pendidikan Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber pendidikan Islam tersebut dapat ditemukan di dalamnya kata-kata atau istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan.

a. Al-Qur'an

Al Qur'an mempunyai kedudukan sebagai sumber pokok ajaran Islam dapat dipahami dari ayat berikut:

Artinya : Sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu, penuh berkah, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran yang cerah mendapat pelajaran. (Q.S. Shaad:29)

b. As-Sunna

Posisi Hadits sebagai sumber kedua setelah Al-qur'an disebabkan hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Qur'an itu sendiri, disamping memang sunnah merupakan sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya.

Artinya : "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sholeh". (HR Bukhari).

c. Dasar Tambahan

Selain Al Qur'an dan Sunnah, ada beberapa dasar yang bisa dijadikan sebagai dasar tambahan dalam pendidikan Islam, diantaranya:

a) Ijtihad

Ijtihada di bidang pendidikan ternyata semakin perlu, sebab ajaran islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya berupa prinsip-prinsip pokok. Sedangkan sejak turunnya ajaran Islam kepada

Nabi Muhammad SAW sampai sekarang Islam telah tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Maka diperlukan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang.

b) Masalah Mursalah

Masalah Mursalah yaitu : “menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan”.

c) Urf (Nilai-Nilai dan Adat Istiadat Masyarakat)

al- ‘Urf adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus menerus dan selanjutnya membentuk semacam hukum tersendiri.

Adapun dasar pendidikan di Negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran No.4 Tahun 1950, Nomor 2 tahun 1945, yang berbunyi : Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Ketetapan MPRS No.XXVII!MPRS! 1966 Bab II Pasal 2 yang berbunyi : Dasar pendidikan adalah falsafah Negara Pancasila
3. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1983 dan GBHN 1988 Bab TV bagian pendidikan berbunyi: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila.
4. Tap MPR Nomor III MPR/1993 tentang GBHN dalam Bab IV bagian Pendidikan yang berbunyi : Pendidikan Nasional (yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

5. Undang-undang RI No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945

Dengan demikian jelaslah bahwa dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan TJUSPN No.2 tahun 1989 dan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003

Dasar pendidikan dapat dilihat dan berbagai segi yaitu:

1. Religius : Merupakan elemen atau dasar pendidikan yang paling pokok, disini di tanamkan nilai-nilai agama islam (iman, akidah dan akhlak) sebagai suatu pondasi yang kokoh dalam pendidikan
2. Ideologis : Yaitu mengacu kepada idiologi bangsa kita yakni pancasila dan berdasarkan kepada UUD 1945. Dan intinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Ekonomis : Pendidikan bisa di jadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dan segala bentuk kebodohan dan kemiskinan
4. Politis : Lebih mengacu kepada suasana politik yang berlangsung
5. Teknologis : Dunia telah mengalami eksposit ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan bisa dikatakan teknologi sangat memiliki peran dalam kemajuan dunia pendidikan.
6. Psikologis dan Pedagogis: Tugas pendidikan sekolah yang utama adalah mengajarkan bagaimana cara belajar, mendidik kejiwaan, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus –menerus sepanjang hidupnya dan memberikan keterampilan kepada peserta didik, mengembangkan daya adaptasi yang besar dalam diri peserta didik.

7. Sosial budaya: Mengaju kepada hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Begitu juga halnya dengan budaya, budaya masyarakat sangat berperan dalam proses pendidikan, karena budaya identik dengan adat dan kebiasaan. Apabila sosial budaya seseorang itu berjalan baik maka pendidikan akan mudah dicapai.

C. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah suatu factor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau hendak di tuju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dan sebuah tujuan yang hendak di capainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia.

1. Prof. Dr. Moh. Athiya El-Abrosyi menyimpulkan lima tujuan pendidikan ini sebagai berikut :
 - 1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia;
 - 2) Persiapan kehidupan di dunia dan akhirat;
 - 3) Persiapan mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan;
 - 4) Menumbuhkan *scientific spirit* pada pelajar dan memuaskan keingintahuan dalam mengkaji ilmu;
 - 5) Menyiapkan peserta didik dari segi profesional.
2. Menurut Ahmad Tafsir , yang menjadi tujuan umum pendidikan ada dua yaitu, *pertama* mampu hidup tenang. *Kedua* produktif. Kedua hal tadi kemudian dirinci menjadi tiga yaitu, *pertama* berbadan sehat dan kuat, *kedua* berotak cerdas dan pandai, *ketiga* memiliki iman yang kuat.

Dari ketiga hal, Ahmad Tafsir merincinya menjadi tujuan khusus yaitu berdisiplin tinggi, jujur, kreatif, ulet, berdaya saing tinggi, mampu

hidup berdampingan dengan orang lain, demokratis, menghargai waktu, dan mampu mengendalikan diri.

1. Menurut Muhaimin , secara umum pendidikan agama Islam bertujuan untuk “meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
2. Prof. H. M. Arifin M.Fd. menyatakan bahwa, tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia muslim yang beriman dan bertaqwa serta berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Khaliqnya dengan sikap dan kepribadian yang merujuk kepada penyerahan diri kepada-Nya dalam segala aspek kehidupan, duniawiah dan ukhrawiah.
3. Ahmad D. Marimba mengemukakan dua macam tujuan pendidikan yaitu sementara dan akhir. Tujuan sementara pendidikan islam yaitu tercapainya tingkat kedewasaan baik jasmaniah maupun rohaniah. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian muslim yaitu kepribadian yang mencerminkan ajaran Islam.

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan pendidikan Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk seorang muslim sempurna yang berkepribadian mulia, sehat jasmani dan rahani, cerdas dan pandai, bertaqwa kepada Allah SWT.

Tujuan pendidikan yang berlaku pada waktu Orde Lama berbeda dengan Orde Baru, demikian juga sejak dari orde baru hingga sekarang, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dan pelita ke pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia.

Tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tujuan pendidikan terdapat dalam UU No 2 Tahun 1985 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakat dan berbangsa.
2. Tujuan pendidikan nasional menurut TAP MPR NO II/ MPR! 1993 yaitu Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja professional serta sehat jasmani dan rohani.
3. TAP MPR No 4/MPR/1975, tujuan pendidikan adalah membangun dibidang pendidikan didasarkan atas falsafah Negara pancasila dan di arahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun pembangun yang berpancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh tanggung rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

Adapun tujuan pendidikan di Negara Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau Negara tentang cirri-ciri seseorang manusia yang dihasilkan proses pendidikan atau manusia yang

terdidik. Adapun yang di maksud dengan tujuan pendidikan Nasional adalah tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga Negara yang dicita-citakan bersama.

Tujuan pendidikan nasional secara formal di Indonesia telah beberapa kali mengalami perumusan atau perubahan, dan rumusan tujuan pendidikan nasional yang terakhir seperti disebutkan dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab II Pasal 3 yang berbunyi : Tujuan pendidikan nasional ialah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perumusan tujuan pendidikan nasional tersebut dapat memberikan arah yang jelas bagi setiap usaha pendidikan di Indonesia. Untuk dapat menepati tujuan pendidikan nasional tersebut, dibutuhkan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang masing-masing mempunyai tujuan tersendiri, yang selaras dengan tujuan nasional. Oleh karena itu , setiap usaha pendidikan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tujuan tersebut.

2. Tujuan Institusional

Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugas yang harus dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu.

Sebagai subsistem pendidikan nasional, tujuan institusional untuk setiap lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Hal ini disebabkan setiap lembaga pendidikan ingin menghasilkan

lulusan yang akan menunjang tinggi martabat bangsa dan negaranya, yang bertekad untuk mempertahankan falsafah Pancasila sebagai dasar Negara, di samping kemampuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan ke khususan setiap lembaga.

Dengan demikian, perumusan tujuan institusional dipengaruhi oleh tiga hal: Tujuan Pendidikan Nasional. Kekhususan setiap lembaga dan Tingkat usia peserta didik. Tujuan institusional itu dicapai melalui pemberian berbagai pengalaman belajar kepada peserta didiknya.

3. Tujuan Kurikuler

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan secara formal pada kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan tujuan institusional, tetapi tidak boleh menyimpang dan tujuan institusional. Seperti misalnya, tujuan kurikulum di sekolah-sekolah ada mata pelajaran kewarganegaraan yang berbeda dibandingkan dengan SMP.

Tujuan mata pelajaran untuk kewarganegaraan di sekolah-sekolah tersebut disebut tujuan kurikuler sesuai dengan kurikulum pada masing-masing sekolah. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dan tujuan institusional, yang berarti lebih khusus dan pada tujuan Institusional.

1) Tujuan Instruksional

Tujuan Instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah selesai proses belajar mengajar/program pengajaran. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dan tujuan kurikuler, yang merupakan perubahan sikap atau tingkah laku secara jelas. Tujuan Instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Dalam merumuskan tujuan-tujuan instruksional ini terlebih-lebih tujuan instruksional khusus berorientasi kepada peserta didik, atau kepada

output oriented. Tujuan instruksional akan mempengaruhi pemilihan materi, metode, strategi, dan lainnya demi mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan.

Sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan harus mencerminkan kemampuan system pendidikan Nasional untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan peran yang multi dimensional. Secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat, yang sehat dan cerdas dengan: Kepribadian yang kuat, religious dan menjunjung tinggi budaya luhur, kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesadaran moral hukum yang tinggi dan kehidupan yang makmur dan sejahtera.

PENUTUP

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pendidikan Islam adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktifitas pendidikan Islam. Para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa yang menjadi dasar dalam pendidikan Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad dari para ulama.

Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk seorang muslim sempurna yang berkepribadian mulia, sehat jasmani dan rahani, cerdas dan pandai, bertaqwa kepada Allah SWT.

Pada dasarnya semua hal yang menyangkut pendidikan nasional, baik itu dasar dan tujuan pendidikan nasional semuanya terangkum dalam UUSPN No. 2 Tahun 2003 serta tak lepas dan UUD 1945 dan Pancasila.

Dasar pendidikan menurut islam fokus kepada AL-Qur'an dan AL-hadist sedang secara umum dasar pendidikan juga lebih menitik beratkan ke dasar religious.

Tujuan pendidikan baik secara islam dan umum hampir memiliki kesamaan yaitu mendapatkan kesuksesan. Apabila digabungkan maka tujuan pendidikan adalah upaya untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik maka perlu adanya pemahaman terhadap dasar dan tujuan pendidikan secara mendalam baik secara islam maupun secara umum

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG GURU

Hafidz Karomi

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
hafidzkaromi@gmail.com

Abstrak

Selain sebagai pelaksana kebijakan (dalam hal ini kurikulum pendidikan), guru juga berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum. Merekalah yang tahu persis bagaimana pelaksanaan kurikulum pendidikan yang telah disusun oleh pemerintah dan mengaplikasikannya pada proses pembelajaran di sekolah, terlebih lagi penerapannya di setiap kelasnya. Oleh karenanya, keberhasilan suatu tujuan pendidikan yang telah direncanakan terdapat pada tangan seorang guru sebagai pelaksananya. Sebaik apapun kurikulum itu dirubah dan disusun kembali, jika pelaksanaan di lapangan masih tetap sama, maka hasilnya pun akan tetap sama, artinya tidak akan ada perubahan. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) sebagai pemegang “monopoli” penyelenggara pendidikan guru agama, serta sebagai pengambil keputusan pendidikan tingkat makro, sudah mengambil berbagai macam langkah kongkrit demi terciptanya pendidikan dan guru yang ideal. Mulai dari pembentukan lembaga-lembaga pencetak calon guru seperti SGAI (Sekolah Guru Agama Islam), PGA (Pendidikan Guru Agama), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), hingga FAI (Fakultas Agama Islam) dan FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan).

Kata kunci: analisis, kebijakan, pemerintah, guru

PENDAHULUAN

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam setiap satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, “guru” merupakan

sentral pelaksanaan kurikulum. Guru yang harus lebih dahulu mengenal, memahami, dan melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam kurikulum. Tanpa guru, kurikulum itu hanyalah benda mati yang tidak berarti.

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Selain sebagai pelaksana kebijakan (dalam hal ini kurikulum pendidikan), guru juga berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum. Merekalah yang tahu persis bagaimana pelaksanaan kurikulum pendidikan yang telah disusun oleh pemerintah dan mengaplikasikannya pada proses pembelajaran di sekolah, terlebih lagi penerapannya di setiap kelasnya. Oleh karenanya, keberhasilan suatu tujuan pendidikan yang telah direncanakan terdapat pada tangan seorang guru sebagai pelaksananya. Sebaik apapun kurikulum itu dirubah dan disusun kembali, jika pelaksanaan di lapangan masih tetap sama, maka hasilnya pun akan tetap sama, artinya tidak akan ada perubahan.

Ketetapan undang-undang tersebut menuntut sebuah tanggungjawab yang tidak ringan bagi seorang pendidik (guru). Kegiatan-kegiatan yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi aktivitas tersebut harus dibarengi dengan *transfer of knowledge* serta internalisasi nilai-nilai etika dan moral. Kesemuanya itu tentulah membutuhkan kemampuan dari seorang guru yang cakap dan terampil. Agar tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai dengan baik. Terlebih lagi

tuntutan dari seorang guru yang semakin berkembang dari masa ke masa seiring dengan perkembangan zaman.

Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) sebagai pemegang “monopoli” penyelenggara pendidikan guru agama, serta sebagai pengambil keputusan pendidikan tingkat makro, sudah mengambil berbagai macam langkah kongkrit demi terciptanya pendidikan dan guru yang ideal. Mulai dari pembentukan lembaga-lembaga pencetak calon guru seperti SGAI (Sekolah Guru Agama Islam), PGA (Pendidikan Guru Agama), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), hingga FAI (Fakultas Agama Islam) dan FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan).

Penjalanan panjang Kementerian Agama dalam menyelenggarakan pendidikan guru agama juga sudah banyak menuai kebijakan dalam upaya pengembangan kompetensi guru. Oleh karenanya, pembahasan tentang kebijakan pendidikan Islam yang berhubungan dengan aspek guru, terutama dalam hal profesi dan kompetensinya sangat menarik untuk dibahas dan dikaji.

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis menentukan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui hakikat yang sesungguhnya dari Guru Agama Islam, serta untuk mengetahui peranan politik dan kebijakan pendidikan Islam yang terkait dengan aspek pendidik (guru).

PEMBAHASAN

A. Hakikat Pendidik (Guru) dalam Islam

1. Definisi Pendidik (Guru)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariaanya, profesinya) mengajar. Dari

definisi ini, batasan guru sangatlah luas, siapapun yang mengajar atau mendidik dapat disebut sebagai seorang guru, tanpa membedakan materi dan tingkatan pendidikan dari setiap peserta didik. Dari definisi tersebut, pemerintah memberi batasan yang jelas tentang pengertian pendidik dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menurut Mohammad Kosim, guru merupakan pendidik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik agar terbentuk kepribadian utama. Apabila hal ini diintegrasikan dengan pengertian pendidik dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka tugas utama guru adalah mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya melalui kegiatan mendidik, melatih, mengajar, membimbing, mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik.

Dalam hal tersebut, ada tiga aspek kepribadian peserta didik yang harus dikembangkan oleh pendidik (guru) yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Aspek kognitif meliputi tujuan yang berhubungan dengan kemampuan berfikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Aspek afektif mencakup tujuan yang berkaitan dengan sikap, nilai (moral dan agama), minat dan apresiasi. Aspek psikomotor meliputi tujuan yang berhubungan keterampilan manual dan motorik.

Sedangkan menurut Hamruni, pendidik adalah bapak rohani (*spiritual father*) bagi anak didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu,

pembinaan akhlak mulia, dan meluruskannya. Sementara itu, Islam memposisikan guru dalam posisi yang sangat mulia, karena gurulah yang menyampaikan ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu pengetahuan tersebutlah manusia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa profesi seorang pendidik (guru) merupakan sebuah tugas mulia yang dilakukan seseorang untuk membentuk aspek kepribadian peserta didik mulai dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut haruslah diarahkan sejalan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Namun, dalam perkembangannya, pendidik (guru) bukan hanya bertugas sebagai pembimbing dan pen-transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai serta moral, akan tetapi juga merupakan fasilitator, pengolah, dan perencana dari pendidikan. maka tidak heran jika dikatakan bahwa guru adalah ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan.

Saat sekarang ini, pengertian tersebut telah mengalami berbagai perkembangan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan dunia pendidikan. seorang guru juga dituntut sebagai profesi. Sejalan dengan hal tersebut, guru juga dituntut untuk memiliki standar-standar kompetensi tertentu agar dapat dinyatakan sebagai guru profesional.

2. Guru Profesional

Menurut Suparlan, profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Profesional menunjuk dua hal, yakni orangnya dan penampilan atau kinerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan pengertian pendidik dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka guru juga dikenal sebagai salah satu pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu yang lebih spesifik. Sehingga, dalam

perkembangan yang semakin maju, hal tersebut juga ditandai dengan tuntutan guru untuk memenuhi kompetensi tertentu untuk dianggap sebagai guru professional.

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa: Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Untuk menjadi seorang pendidik tidaklah mudah, karena ia harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Lebih lanjut disebutkan bahwa kompetensi pendidik tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dari uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa seorang pendidik yang professional harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut:

- a. Penguasaan materi al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pengayaan, terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya.
- b. Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metode dan teknik) pendidikan Islam,
termasuk kemampuan evaluasinya.
- c. Penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan.
- d. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan pada umumnya
guna keperluan pengembangan pendidikan Islam.
- e. Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung maupun tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya.

Dalam hal ini, untuk dapat mewujudkan guru yang professional, kita dapat mengacu pada Nabi Muhammad SAW. Beliau berhasil menjadi seorang pemimpin sekaligus pendidik yang ideal dengan berlandaskan kepribadian

yang berkualitas serta unggul. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang Rasul, beliau sudah dikenal sebagai pribadi yang berbudi luhur dan mendapat julukan *Al-Amien* yang artinya dapat dipercaya. Sehingga Allahpun menerangkan bahwa pada diri Muhammad itu terdapat contoh (teladan) yang baik seluruh umatnya

B. Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam terkait dengan Aspek Pendidik (Guru)

Berbicara mengenai politik dan kebijakan pendidikan, secara garis besar membicarakan tentang pendidikan di tingkat makro (pemerintah). Namun, tidak menutup kemungkinan untuk membahas tentang berbagai hal di tingkat mikro (kelembagaan). Dalam hal ini, akan berupaya membahas tentang berbagai macam politik dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam baik di tingkat makro maupun mikro.

Dalam pendidikan, guru memiliki tugas ganda, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, seorang guru dituntut untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan sebagai abdi masyarakat, seorang guru dituntut agar bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mendidiknya agar terbentuk masyarakat yang bermartabat. Maka tidak heran jika ditengah-tengah masyarakat, apalagi di daerah pedesaan, seorang guru sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat disekitarnya.

Seorang guru, selain dituntut dapat menyampaikan materi pembelajaran di kelas, juga dituntut agar bisa mengembangkan dan membina akhlak dari setiap peserta didiknya. Serta mampu menjadi suri tauladan dimana ia berada. Terlebih guru Pendidikan Agama Islam.

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan lembaga pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dengan demikian, pendidikan agama menjadi salah satu komponen wajib yang harus diadakan dalam sebuah kurikulum pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga komponen guru agama menjadi salah satu elemen terpenting dari penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah.

Menurut Mastuhu, yang dikutip oleh Nunu Ahmad dkk, keberadaan guru agama merupakan komponen terpenting dari penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Persoalan guru tidak hanya sebagai tenaga pengajar saja melainkan juga sebagai pendidik. Artinya, guru tidak hanya memberikan konsep berpikir, melainkan juga harus bisa menimbulkan prakarsa, motivasi, dan aktualisasi pada diri peserta didik ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional dan institusional yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut terus direspon oleh pemerintah dengan membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru, terutama guru pendidikan agama. Jika merujuk pada Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 12 ayat 1.a yang menyatakan bahwa "*pendidikan agama untuk peserta didik harus diajarkan oleh guru yang seagama*", akan terjadi ketidakjelasan makna siapa dan bagaimana kualifikasi pendidik yang diperbolehkan mengajar pendidikan agama. Apakah hanya sekedar seagama saja? Atau guru tersebut juga harus memiliki latar belakang pendidikan agama yang akan diajarkan?

Setelah disahkannya Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, semua calon guru harus berpendidikan minimal sarjana atau diploma empat, dan untuk menjadi guru profesional harus lulus pendidikan profesi

yang ditandai dengan pemberian sertifikat pendidik. Sehingga, status gurupun meningkat menjadi guru professional. Oleh karena itu, selain harus memiliki ijazah pendidikan, para calon guru juga harus lulus pendidikan profesi guru untuk menjadi guru professional.

Untuk merealisasikanya, pemerintah mengeluarkan sejumlah ketentuan yang meliputi:

1. Permendiknas Nomor 18/2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru.
3. Permendiknas Nomor 8/2009 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
4. Permendiknas Nomor 10/2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
5. Permendiknas Nomor 9/2010 tentang Pendidikan Profesi guru bagi Guru dalam Jabatan.
6. Permendiknas Nomor 11/2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Ketentuan tersebut mengatur tentang banyak hal mengenai teknis pelaksanaan sertifikasi guru untuk membentuk guru yang professional. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa sertifikat pendidik dapat diperoleh melalui empat jalur, yaitu melalui: (1) penilaian portofolio, (2) pendidikan dan latihan profesi guru, (3) pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan (4) pendidikan profesi guru. Keempat jalur ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara LPTK yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh pemerintah.

Penilaian portofolio merupakan proses pemberian sertifikat bagi guru dalam jabatan yang memenuhi syarat melalui penilaian portofolio. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud merupakan pengakuan atas pengalaman

professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

1. Kualifikasi akademik.
2. Pendidikan dan pelatihan.
3. Pengalaman mengajar.
4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
5. Penilaian dari atasan dan pengawas.
6. Prestasi akademik.
7. Karya pengembangan profesi.
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah.
9. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diberikan pada guru dalam jabatan yang tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio, tidak lulus penilaian portofolio dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung[19]. Materi PLPG diarahkan agar pendidik memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran.

Pemberian sertifikat secara langsung diberikan pada guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b atau guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka krsdit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) dibuka bagi guru dalam jabatan dan guru prajabatan yang telah lulus program sarjana atau diploma empat dan

memenuhi syarat. Program ini bertujuan menghasilkan guru professional yang memiliki kompetensi dalam merencanakan melaksanakan dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melaksanakan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, mampu melaksanakan penelitian dan mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan.

Dari keempat jalur sertifikasi guru yang diselenggarakan saat ini, yang paling ideal dalam menyiapkan calon guru professional adalah jalur PPG. Sedangkan ketiga jalur lainnya, memiliki banyak kelemahan. Jalur portofolio tidak berpengaruh langsung pada pembinaan mutu gur, apalagi sulit dilacak apakah dokumen-dokumen yang dikumpulkan guru terkait kompetensinya sebaga pendidik, merupakan dokumen asli atau palsu. Jalur PLPG yang hanya berlangsung sekitar seluruh hari, diragukan mampu memberikan dampak optimal bagi pengembangan mutu guru. Demikian pula dengan jalur pemberian sertifikat langsung yang tampaknya lebih mempertimbangkan masa kerja dan ijasah, tidak mudah menghasilkan guru-guru yang kompeten.

Tuntutan seorang guru yang begitu banyak dalam menjalankan tugas profesinya tersebut, tentunya berbanding lurus dengan usaha pemerintah dalam upaya pensejahteraan guru, baik dengan kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan berbagai tunjangan fungsional lainnya. Kesemuanya itu dimaksudkan agar kualitas para guru meningkat dari tahun-ke tahun. Akan tetapi, pada kenyataanya harapan itu tidaklah seimbang dengan kenyataan dilapangan.

Terlebih dengan banyaknya berbagai Perguruan tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan untuk para calon guru. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk dapat mengontrol kualitas *output* dari masing-masing lulusan. Lain dari pada itu, untuk mempertahankan

kualitas kompetensi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran juga tak kalah penting. Hal ini harus dijaga dan disadari penuh oleh setiap guru.

PENUTUP

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. untuk dapat melaksanakan tugas profesinya, seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, personal, sosial dan professional.

Untuk disebut sebagai pendidik yang professional, seorang guru harus menempuh jalur sertifikasi. Dalam ketentuan yang ada, dinyatakan bahwa sertifikat pendidik dapat diperoleh melalui empat jalur, yaitu melalui: (1) penilaian portofolio, (2) pendidikan dan latihan profesi guru, (3) pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan (4) pendidikan profesi guru. Keempat jalur ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara LPTK yang memenuhi syarat dan ditunjuk oleh pemerintah.

Dari keempat jalur sertifikasi guru yang diselenggarakan saat ini, yang paling ideal dalam menyiapkan calon guru professional adala jalur PPG. Penyiapan calon guru professional kedepan harus melalui satu jalur, yaitu PPG, yang dilaksanakan dengan seleksi ketat dari aspek penyelenggara, peserta dan proses PPG. Untuk menjamin kualitas guru, sertifikat pendidik tidak boleh berlaku selamanya. Akan tetapi harus ada uji berkala, misalnya setiap lima tahun sekali. Agar nantinya kualitas dari guru professional itu dapat terjaga, lain dari pada itu agar setiap pemegang sertifikat tersebut berupaya untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya pemantauan yang maksimal dari pemerintah mengenai pelaksanaan setiap keputusan yang telah diambil.
2. Sebagai lembaga pencetak calon guru, Perguruan Tinggi selain harus memperhatikan kualitas *output*-nya juga memperhatikan kebutuhan dunia pendidikan akan kuantitas guru.
3. Perlu adanya uji berkala bagi setiap pemegang sertifikat pendidik agar menjadi semangat untuk meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme yang dimiliki.
4. Perlu adanya kesadaran diri bagi setiap pendidik untuk senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai pendidik. Baik dari kompetensi pedagogik, personal, sosial maupun profesionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nahidl, Nunu Ahmad dkk. 2010. *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Hamruni. 2008. *Konsep edutainment dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Kosim, Mohammad. 2012. *Pendidikan Guru Agama di Indonesia: Pergumulan dan Problema Kebijakan 1948-2011*. Bantul: Pustaka Nusantara.
- Rohmat, Ali. 2009. *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Sekses Offset.
- Suparlan. 2006. *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Permendiknas Nomor 9/2010 tentang Pendidikan Profesi guru bagi Guru dalam Jabatan.
- Permendiknas Nomor 11/2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM: ASPEK TENAGA KEPENDIDIKAN (TATA USAHA)

Meliska Fiuluminnisa

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten
Email: Meliskay.23@gmail.com

Abstrak

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan tenaga kependidikan di SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. tandar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Pelaksana urusan terdiri atas Urusan Administrasi Kepegawaian, Urusan Administrasi Keuangan, Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Urusan Administrasi Kesiswaan, dan Urusan Administrasi Kurikulum. Petugas layanan khusus terdiri atas penjaga sekolah/madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan lain-lain.

Kata kunci: politik, kebijakan, tenaga kependidikan

PENDAHULUAN

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik pada masa SMK memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta memiliki sertifikat profesi guru untuk SMK. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan tenaga kependidikan di SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Permendiknas No. 24 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, menyebutkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Pelaksana urusan terdiri atas Urusan Administrasi Kepegawaian, Urusan Administrasi Keuangan, Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Urusan Administrasi Kesiswaan, dan Urusan Administrasi Kurikulum. Petugas layanan khusus terdiri atas penjaga sekolah/madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidik

Pendidik apabila ditinjau dari segi bahasa (etimologi), sebagaimana yang dijelaskan oleh WJS. Poerwadarminta adalah orang yang mendidik. Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Teacher* yang diartikan guru atau pengajar, atau tutor yang berarti guru pribadi (private). Dalam bahasa Arab disebut *Ustadz/zah*, *Mudarris*, *Mu`allim*, *Mu`addib*, selanjutnya dalam bahasa Arab kata *Ustadz* adalah jamak dari *asatidz* yang berarti guru (*teacher*), profesor (gelar akademik), jenjang dalam bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. adapun kata *Mudarris* berarti *Teacher* (guru), instruktur (pelatih), trainer (pemandu). sedangkan kata *Muaddib* berarti *educator*/pendidik atau *Teacher In Coranic School* (guru dalam lembaga pendidikan al-Qur`an).^[1]

Sehingga dari berbagai kata di atas dapat menunjukkan berbagai perbedaan ruang gerak dan lingkungan dimana ilmu pengetahuan dan ketrampilan diberikan. Misalnya dalam lingkungan sekolah disebut dengan *teacher* (guru), diperguruan tinggi disebut dosen atau lebih tinggi gelarnya

hingga lecturer atau profesor, sedangkan dirumah-rumah secara pribadi disebut tutor, di pusat-pusat latihan disebut *instructor* atau *trainer*, sedangkan di lembaga pendidikan khususnya yang mengajarkan agama disebut dengan *educator*.

Sedangkan Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.[2]

Secara terminologi, pengertian yang lebih implisit kata pendidik dapat diartikan dengan guru, sebagaimana yang disampaikan oleh Hadari Nawawi yang dikutip oleh Moh. Uzer, pendidik adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Bahwa guru yang berarti orang yang bekerja sebagai tenaga pengajar yang ikut juga bertanggung jawab dalam membantu peserta didik untuk mencapai proses kedewasaan. Tetapi dalam hal ini banyak disalah artikan banyak orang, bahwa hanya gurulah yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Tetapi yang sesungguhnya adalah baik masyarakat lebih-lebih orang tua peserta didik bersama-sama membangun proses pendidikan, agar menjadi masyarakat yang dewasa pula.[3]

Dikutip dari Abuddin Nata, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus pendidikan dalam persepektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Kalau kita melihat secara fungsional kata pendidik dapat di artikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan, keterampilan.[4]

1. Pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. (Sutari Iman Bernadjib, 1994)
2. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. (Umar Tirtarahardja dan La Sulo 1994)
3. Pendidik adalah orang yang dengan sengaja membantu orang lain untuk mencapai kedewasaan. (Langeveld)

Penyebutan nama pendidik di beberapa tempat memiliki sebutan berbeda-beda.

- a. Pendidik di lingkungan keluarga adalah orang tua dari anak yang biasa disebut ayah ibu atau papa-mama.
- b. Pendidik di lingkungan pesantren biasa disebut ustadz, kyai, romo kyai. § Pendidik di lingkungan pendidikan di masyarakat disebut dengan istilah tutor, fasilitator, atau instruktur.
- c. Pendidik di lingkungan sekolah biasa disebut guru.

Undang – undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

B. Pengertian Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah: kepala satuan pendidikan; pendidik; dan tenaga kependidikan lainnya.

Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan mediator (Emaslim-FM). Istilah lain untuk *Kepala Satuan Pendidikan* adalah: Kepala Sekolah, Rektor, Direktur, serta istilah lainnya. Sedangkan *pendidik* atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu: Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, Ustadz, dan sebutan lainnya. *Tenaga Kependidikan lainnya* ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya:

- a. Wakil-wakil/*Kepala urusan* umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh: *Kepala Urusan Kurikulum*.
- b. Tata usaha, adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikeloladiantaranya; Administrasi surat menyurat dan pengarsipan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Peserta Didik, Administrasi Keuangan, Administrasi Inventaris dan lain-lain.
- c. Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di Laboratorium.
- d. Pustakawan, Pelatih ekstrakurikuler, Petugas keamanan (penjaga sekolah), Petugas kebersihan, dan lainnya

C. Tenaga Administrasi Sekolah

Manusia dalam kehidupan dan penghidupannya memiliki berbagai peranan. Tenaga Administrasi Sekolah dalam kesehariannya dapat berperan sebagai administrator ketika di sekolah, mungkin berperan sebagai kepala rumah tangga ketika di rumah, berperan sebagai anggota ketika rapat di suatu organisasi, berperan sebagai pemain dalam salah satu cabang olah raga, dan sebagainya. Peranan itu dapat saling mendukung dan dapat pula saling bertentangan. Peranan memiliki harapan-harapan, harapannya adalah kepala sekolah, guru, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang-orang di luar sekolah yang berkepentingan dan peduli dengan sekolah mau dan mampu memanfaatkan peranan dan fungsitenaga administrasi sekolah dengan sebaik-baiknya.

1. Peran Tenaga Adiministrasi Sekolah

Suatu bagian penting dari lembaga ialah peranan. Peranan ialah aspek-aspek dinamis dari kedudukan dan jabatan di dalam suatu lembaga, dan ia menetapkan perilaku para pemegang peranan itu. Di sekolah, pemegang peranan itu meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Peranan memiliki harapan-harapan yaitu kewajiban, tanggung jawab, dan haknya. Sifat pokok dari peranan-peranan adalah satu sama lain saling melengkapi untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif, efisien, mandiri, dan akuntabel. Misalnya, guru berperan memberi pembelajaran, siswa berperan sebagai pembelajar. Pengawas berperan sebagai pembimbing kepala sekola, kepala sekolah berperan sebagai pihak yang dibimbing. Tenaga administrasi sekolah berperan sebagai administrator; kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua yang memanfaatkan administrasi tersebut. Semua peranan masing-masing adalah untuk mencapai tujuan sekolah. Penghargaan terhadap pentingnya peranan dan fungsitenaga administrasi sekolah sampai saat ini masih kurang disadari dan kurang mendapat perhatian baik oleh warga sekolah, warga

masyarakat, ilmuwan, maupun pejabat. Tetapi, dengan adanya Direktorat Tenaga Kependidikan, niat dan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta citra tenaga administrasi sekolah semakin mendapat perhatian. Terbukti dengan semakin banyaknya bimbingan teknik (pelatihan) tenaga administrasi sekolah yang telah dilakukan Direktorat Tenaga Kependidikan di mana sebelumnya pelatihan seperti ini sangat langka dilaksanakan. Sebenarnya, kalau kita mau jujur, dan berdialog dengan hati nurani dan menganggap sekolah sebagai suatu sistem sosial; maka peranan dan fungsi setiap orang sama pentingnya karena masing-masing saling membutuhkan. Ada pendapat yang keliru dimasyarakat bahwa tenaga administrasi sekolah tidak penting, tidak perlu dilatih karena pekerjaannya hanyalah mengurus surat-menyurat. Pada hal kenyataan di lapangan, Kepala tenaga administrasi sekolah memiliki staf yang harus ia kelola secara profesional dengan keterampilan managerialnya.

Peranan tenaga administrasi sekolah sangat erat hubungannya dengan otoritas formal yang diberikan oleh sekolah. Otoritas formal tersebut berupa tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi sekolah. Pekerjaan tenaga administrasi menurut Terry meliputi: penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan surat menyurat dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol dari pimpinan. Selanjutnya ditambahkan Terry bahwa tujuh kegiatan tenaga administrasi adalah: (1) mengetik, (2) menghitung, (3) memeriksa, (4) menyimpan, (5) menelpon, (6) menggandakan, (7) mengirim surat, dan (8) lain-lain. Sedangkan Mill dan Standingford (1982) menyebutkan delapan kegiatan tenaga administrasi yaitu: (1) menulis surat, (2) membaca, (3) menyalin (menggandakan), (4) menghitung, (5) memeriksa, (6) memilah (menggolongkan dan menyatukan), (7) menyimpan dan menyusun indeks, dan (8) melakukan komunikasi (lisan dan tertulis). Menurut The Lian Gie, tenaga

tata usaha memiliki tiga peranan pokok yaitu: (1) melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, (2) menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat, dan (3) membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Berdasarkan pendapat The Lian Gie di atas, maka peranan tenaga administrasi sekolah sesungguhnya hanya satu yaitu sebagai administrator karena ketiga peranan yang diungkapkan di atas yaitu melayani, menyediakan, dan membantu sama dengan administrasi. Jika ditinjau dari sudut asal usul kata (etimologis), maka administrasi berasal dari Bahasa Latin, *ad* + *ministrare*. *Ad* berarti intensif, sedangkan *ministrare* berarti melayani, membantu, dan memenuhi atau menyediakan.

Selanjutnya dijelaskan oleh The Liang Gie, bahwa untuk Indonesia dapatlah kini secara lengkap tata usaha dirumuskan sebagai segenap rangkaian kegiatan yang menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Pekerjaan catat-mencatat atau tulis-menulis mendukung falsafah yang digunakan dalam Sistem Manajemen Mutu International Standart Organization 9001:2000 (SMM ISO 9001:2000) yaitu, "Tulis yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda tulis." Jika mutu sekolah Indonesia ingin diakui dunia internasional, maka sekolah harus menerapkan dan memiliki sertifikat ISO 9001:2000. Pekerjaan catat mencatat mendukung salah satu fungsi manajemen yang dikembangkan oleh Gullick & Urwick (1937) (Hoy & Miskel, 2005) dengan akronim POSDCoRB (Planning, Organizing, Staffing, Coordinating, Reporting, and Budgeting). Pekerjaan catat-mencatat mendukung salah satu karakteristik birokrasi yaitu administrasi adalah tindakan catat-mencatat seperti yang dinyatakan Weber.

Dari berbagai pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwa peranan tenaga administrasi sekolah adalah sebagai administrator. Jika tenaga administrasi

sekolah tersebut memiliki staf, maka peranannya bertambah satu yaitu sebagai pengelola (manager). Manajer menurut The Liang Gie, ialah seorang yang mampu: melihat semua urusan dalam keseluruhannya, melimpahkan pekerjaannya, membangkitkan gairah kerja, memberikan insipasi, membimbing stafnya, bekerja sama, dan menerapkan teknik-teknik administrasi perkantoran. Sebagai seorang administrator, ia harus memahami dan mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi sekolah sesuai pedoman pengelolaan administrasi sekolah. Jadi, seorang administrator harus mampu sebagai koordinator. Di samping itu, ia juga harus mampu menciptakan pelayanan administrasi yang lancar dan tepat waktu. Peranan kepala tenaga administrasi sekolah sebagai manajer lainnya lagi adalah sebagai planner karena ia harus membuat rencana dan program kerja ketatausahaan. Sebagai organizer karena ia harus mengorganisasikan stafnya. Dari pengalaman lapangan diketahui bahwa staf tenaga administrasi sekolah yang paling lengkap kebanyakan berada di SMK favorit. Di SMK tersebut, idealnya terdapat 13 orang staf administrasi sekolah dengan tugas sebagai: (1) pelaksana urusan persuratan dan pengarsipan (kesekretariatan), (2) pelaksana urusan kepegawaian (pendidik dan tenaga kependidikan), (3) pelaksana urusan keuangan (pembiayaan sekolah/madrasah), (4) pelaksana urusan kurikulum (isi) dan pembelajaran (proses), (5) pelaksana urusan kesiswaan (peserta didik), (6) pelaksana urusan sarana dan prasarana, (7) pelaksana urusan hubungan sekolah dengan masyarakat, (8) pesuruh (caraka), (10) pengemudi (pada sekolah yang sudah memiliki mobil), (11) penjaga sekolah, (12) tukang kebun (pada SMK Pertanian), dan (13) tenaga kebersihan S/M. Dengan diterapkannya delapan standar pendidikan nasional di sekolah, maka pelaksana urusan akan bertambah lagi yaitu: (1) pelaksana urusan kompetensi lulusan, dan (2) pelaksana urusan penilaian pendidikan. Tugas-tugas di atas tentunya dapat dirangkap tergantung

kebutuhan sekolah masing-masing. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, maka tenaga kebersihan, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboran/teknisi bukan lagi menjadi staf tenaga administrasi sekolah tetapi kedudukannya tersendiri yaitu sebagai salah satu tenaga kependidikan seperti halnya dengan tenaga administrasi sekolah. Peranan semua pelaksana urusan adalah sebagai administrator. Peranan pesuruh adalah sebagai pengantar surat (expeditor atau distributor) dan melayani konsumsi tamu (waiter). Peranan pengemudi adalah sebagai sopir (driver). Peranan tukang kebun adalah pemelihara kebun (caretaker). Tenaga administrasi sekolah sebagai pribadi tidak dapat melepaskan peranannya sebagai personal. Berkenaan dengan kualitas personal, Denyer (1975) menyatakan bahwa kualitas kepribadian tenaga administrasi sekolah yang penting-penting adalah kegairahan (enthusiasm), ketulusan (sincerity), kebijaksanaan (wisdom), dan pengendalian diri (self-control). Berkaitan dengan ketulusan, Sri Pannyavaro (2007) menyatakan bahwa di antara pekerjaan luhur yang dilakukan manusia adalah melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jika seseorang membantu orang lain dengan ketulusan atau keikhlasan, maka ia akan mendapat kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang tidak tulus akan lebih banyak merasa gelisah dan khawatir, bahkan kecewa dan menyesal manakala mendapati kenyataan yang sesuai harapan. Keberadaannya selalu dibutuhkan dan ketiadaannya selalu dkenang. Tenaga administrasi sekolah sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan peranannya sebagai orang yang sosial.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan tenaga administrasi sekolah adalah sebagai: administrator, personal, dan sosial. Peranan kepala tenaga administrasi sekolah adalah sebagai: administrator, personal, sosial, dan manajer. Peranan sebagai administrator memiliki subperanan sebagai: collector, reporter, programmer,

calculator, duplicator, sender, archivist, communicator, technician, expeditor, waiter, dan caretaker. Peranan sebagai manajer memiliki subperanan sebagai: planner, organizer, motivator, coordinator, delegator, problem solver, decision maker, dan evaluator.

2. Fungsi Tenaga Administrasi Sekolah

Fungsi ialah sekelompok tugas pekerjaan meliputi sejumlah aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat-sifatnya, pelaksanaannya atau karena merupakan suatu urutan ataupun secara praktis saling tergantung satu sama lain. Fungsi dalam suatu organisasi dibebankan kepada seseorang petugas atau satuan tertentu sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Tenaga administrasi sebagai pekerjaan pelayanan (service work) yang mempunyai fungsi memfasilitasi (function facilitating), untuk membantu pekerjaan-pekerjaan pokok (substantif) berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi administrasi perkantoran adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan surat menyurat dari suatu organisasi. Administrasi perkantoran sebagai fungsi yang menyangkut manajemen dan pengarahannya semua tahap operasi perusahaan yang mengenai pengolahan bahan keterangan, komunikasi, dan ingatan organisasi. Depdiknas (2001) menyatakan bahwa fungsi tenaga administrasi sekolah adalah: (1) Kepala Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha bertugas membantu kepala sekolah/madrasah dalam kegiatan administrasi (urusan surat menyurat, ketatausahaan) sekolah/madrasah yang berkaitan dengan pembelajaran, (2) Pelaksana urusan kepegawaian bertugas membantu Kepala Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha dalam kegiatan atau kelancaran kepegawaian baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah/madrasah, (3) Pelaksana urusan keuangan bertugas membantu Kepala Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengelola keuangan sekolah/ madrasah, (4)

Pelaksana urusan perlengkapan/logistik bertugas membantu Kepala Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengelola perlengkapan/logistik sekolah/madrasah, (5) Pelaksana sekretariat dan kesiswaan bertugas membantu Kepala Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengelola kesekretariatan dan kesiswaan, (6) Pengemudi bertugas sebagai sopir, (7) Penjaga sekolah/madrasah bertugas memelihara dan memperbaiki fasilitas sekolah/madrasah berupa bangunan, kelistrikan, dan peralatan praktik. Joko Kuncoro (2002) menyatakan bahwa pekerjaan kantor atau tata usaha memiliki berbagai sebutan lain seperti office work, paper work, dan clerical work diperlukan oleh semua jenis aktivitas substantif agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, pekerjaan tenaga administrasi sekolah merupakan pelayanan yang berfungsi meringankan (facilitating function) terhadap pencapaian tujuan aktivitas substantif. Setiap organisasi, apapun bentuk, jenis, corak, dan tujuannya terdiri atas dua pekerjaan yaitu aktivitas substantif dan pekerjaan kantor. Organisasi sekolah mempunyai aktivitas substantif berupa pembelajaran dan pekerjaan kantor berupa administrasi sekolah.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi tenaga administrasi sekolah adalah memberikan pelayanan prima di bidang administrasi. Pelayanan prima dalam hal ini mengandung arti sebenarnya dan arti singkatan. Pelayanan prima dalam arti sebenarnya menurut Anonim (2000) ialah pelayanan yang sesuai atau melebihi standar yang ada. Pelayanan prima sesungguhnya baru ada, apabila sudah ada standar pelayanan. Pelayanan prima di sekolah ialah pelayanan yang sesuai atau melebihi delapan standar pendidikan nasional yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Dengan adanya

delapan standar tersebut berarti S/M dapat melaksanakan pelayanan prima. PELAYANAN PRIMA dalam arti singkatan adalah: Pantas (tepat janji dalam Mutu, Biaya, dan Waktunya = BMW), Empati (memahami kebutuhan konsumen); Langsung (responsif, segera dikerjakan dan tidak berbelit-belit), Akurat (tepat atau teliti, reliabel); Yakin (kredibilitas, dapat dipercaya), Aman (resiko kecil, keraguan kecil), Nyaman (menyenangkan dan memuaskan), Alat (lengkap dan modern), Nyata (penampilan sarana dan parasarana, personil), Perkataan (sopan santun, bersahabat, mudah berkomunikasi, mudah dipahami, konsisten dengan tindakan), Rahasia (kerahasiaan pelayanan terjamin), Informasi (penyuluhan jelas mudah didengar dan dipahami, objektif, valid, reliabel, komprehensif, lengkap, dan mutakhir); Mudah (kesediaan melayani, mudah dihubungi, mudah ditemui, mudah disuruh), dan Ahli (dikerjakan oleh orang yang benar-benar kompeten).

Singkatan PELAYANAN PRIMA di atas, sesungguhnya sudah mengandung dimensi pelayanan prima yaitu: tangible (nyata), reliability (pantas), responsiveness (mudah, kesediaan melayani), competence (ahli), courtesy (perkataan sopan dan ramah), credibility (yakin), security (aman), access (mudah), communication (informasi), dan understanding (empati). Perbedaannya hanya terletak pada urutannya saja.

3. Mengefektifkan Peran dan Fungsi Tenaga Administrasi Sekolah

Efisien (daya guna) ialah proses penghematan sumber daya dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar (do things right), sedangkan efektif (hasil guna) ialah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dengan cara melakukan pekerjaan yang benar (do the right things). Efektif secara kuantitatif adalah perbandingan antara hasil yang diperoleh dibagi dengan target yang harus dicapai, sedangkan efektivitas secara kualitatif adalah tingkat kepuasan yang diperoleh. Keefektifan dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu: (1) individual (input), kelompok (proses), dan (3) organisasi. Keefektifan individual

ditentukan oleh sikap, keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan stres. Keefektifan kelompok ditentukan oleh kekompakan (cohesiveness), kepemimpinan, struktur, status, peranan-peranan, dan norma-norma. Keefektifan organisasi ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategik, struktur, proses, dan budaya.

Mengenai kualitas kepribadian yang penting adalah kegairahan, ketulusan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Tetapi kualitas terpenting adalah kepemimpinan yakni kemampuan membangkitkan gairah, memberikan inspirasi, dan membimbing semua pegawai. Dengan kepemimpinan, manajer perkantoran dapat menghasilkan yang terbaik dari stafnya, dapat membuat staf bekerja sama sebagai sebuah kelompok yang terpadu.

Sedangkan mekanisme pelatihan di dalam kelas menggunakan model TIMS (Training In Management Skills). Untuk menerapkan model TIMS ada sepuluh langkah yang harus dilakukan yaitu: (1) menilai diri sendiri; (2) mempelajari konsep-konsep keterampilan; (3) mengecek konsep pembelajaran; (4) mengidentifikasi perilaku-perilaku yang akan diterampikan; (5) memperagakan keterampilan dalam sebuah latihan mendemonstrasikan; (6) mempraktikkan keterampilan dalam latihan-latihan kelompok; (7) menilai tingkat kompetensi keterampilan dalam bentuk daftar isian kesimpulan; (8) tanya jawab untuk mendukung penggunaan keterampilan; (9) memperbanyak latihan agar semakin terampil; (10) membuat perencanaan tindakan (action planning) mengembangkan keterampilan secara berkelanjutan.

Mata pelatihan untuk mengefektifkan peranan tenaga administrasi sekolah sebagai personal antara lain adalah: (1) mengenal diri sendiri (Who am I?), (2) pengembangan diri (termasuk memotivasi diri sendiri), (2) pengendalian diri, (3) berpikir positif, (4) bertindak asertif, (5) manajemen stres, dan (7) manajemen waktu. Mata pelatihan untuk mengefektifkan

peranan tenaga administrasi sekolah sebagai sosial antara lain adalah: (1) memahami manusia, (2) teknik komunikasi efektif, (3) pengelolaan konflik, dan (4) kerja tim. Mata pelatihan untuk mengefektifkan peranan tenaga administrasi sekolah sebagai administrator antara lain adalah aplikasi program komputer untuk: (1) administrasi persuratan dan kearsipan (kesekretariatan), (2) administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dan standarnya, (3) administrasi keuangan (termasuk RAPBS dan perpajakan) dan standarnya, (4) administrasi isi dan standarnya, (5) administrasi proses dan standarnya, (6) administrasi kesiswaan, (7) standar kompetensi lulusan, (8) administrasi sarana dan prasarana dan standarnya, (9) administrasi kehumasan dan kerjasama, (10) administrasi standar pengelolaan (termasuk implementasi manajemen berbasis sekolah) dan standarnya, (11) administrasi standar penilaian pendidikan, dan (12) administrasi unit produksi sekolah (untuk SMK/MAK). Aplikasi program komputer untuk delapan standar pendidikan nasional dirancang sedemikian rupa sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui standar yang sudah dan belum dipenuhi sekolah secara cepat, akurat, tepat, dan hemat.

Mata pelatihan untuk mengefektifkan peranan kepala tenaga administrasi sekolah sebagai manajer antara lain adalah: (1) perencanaan program ketatausahaan, (2) teknik berorganisasi, (3) teknik memotivasi staf, (3) teknik koordinasi, (4) teknik memimpin staf (tim), (5) teknik delegasi, (6) teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan administratif, (7) manajemen mutu berbasis sekolah, dan (8) teknik menilai kinerja staf (Hunsaker, 2002). Mata pelatihan untuk mengefektifkan fungsi tenaga administrasi sekolah adalah pelayanan prima yang meliputi: (1) konsep pelayanan prima, (2) perilaku pelayanan prima, dan (3) pengembangan kepribadian pelayanan.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat seorang pendidik kaitannya dalam pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan keilmuwan yang dimilikinya. Secara umumnya pendidik adalah orang yang memiliki tanggungjawab mendidik. Bila dipersempit pengertian pendidik adalah guru yang dalam hal ini di suatu lembaga sekolah. Sedangkan pengajar adalah pendidik yang baik. Adapun hakekat pendidik adalah Allah SWT yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan ummat, hakekat peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya, karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.

Tugas dan peran pendidik sangat berkaitan dan tak tidak dapat dipisahkan, tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap diri dan berbagai tantangan kehidupannya, sedangkan peran pendidik adalah sebagai pemimpin dan pelaksana pendidikan dalam suatu masyarakat dan sekaligus sebagai anggota masyarakat, sehingga dengan demikian dituntut guru atau pendidik dalam meningkatkan tugas dan perannya.

Tenaga kependidikan lainnya merupakan salah satu elemen yang keberadaannya sangat penting bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, karena tugas, fungsi dan peranan mereka sangat menunjang bagi kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Kepala satuan pendidikan dan pendidik memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri yang cukup banyak, sehingga jika dua elemen ini pun harus terlibat penuh dalam masalah tata

usaha, laboratorium dan perpustakaan, maka waktu, tenaga dan pikiran mereka akan tersita dan habis, padahal mereka punya tupoksi tersendiri yang sangat penting bagi proses pembelajaran. Oleh karena itu, maka keberadaan tenaga administrasi, tenaga laboran, dan tenaga kepastakaan di sekolah-sekolah saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dianggap sepele lagi. Namun yang mesti diperhatikan adalah kompetensi mereka yang mengisi posisi tersebut, agar peran, tugas dan fungsinya bisa berjalan sebaik mungkin dan membantu kelancaran proses pembelajaran di sekolah.

Peranan ialah kedudukan dan jabatan di S/M. Di S/M, ada yang berperan sebagai Kepala S/M, guru, siswa, dan tenaga kependidikan termasuk TAS/M. Semua peranan sama pentingnya dan saling mendukung untuk mencapai tujuan S/M. Peranan memiliki sejumlah harapan terutama kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Peranan kadang-kadang berkonflik dengan kepribadian. Peranan TAS/M adalah sebagai: administrator, personal, dan sosial. Peranan Kepala TAS/M adalah sebagai administrator, personal, dan sosial, dan manajer. Peranan sebagai administrator memiliki subperanan sebagai collector, reporter, programmer, duplicator, calculator, sender, archivist, communicator, technician, expeditor, waiter, dan caretaker. Peranan sebagai manajer memiliki subperanan sebagai: planner, organizer, motivator, coordinator, delegator, problem solver, decision maker, dan evaluator. Fungsi ialah sekelompok tugas pekerjaan meliputi sejumlah aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat-sifatnya, pelaksanaannya atau urutan. Fungsi dalam suatu organisasi dibebankan kepada seseorang petugas atau satuan tertentu yang harus dilaksanakan. Fungsi TAS/M adalah pelayanan prima di bidang administrasi baik dalam arti sebenarnya maupun singkatan. Salah satu cara untuk mengefektifkan peranan dan fungsi TAS/M ialah dengan mengadakan pelatihan manajerial TAS/M berbasis kompetensi dengan langkah dari analisis

kebutuhan pelatihan sampai laporan pelaksanaan pelatihan. Mata pelatihan untuk mengefektifkan peranan sosial adalah: (1) memahami manusia, (2) teknik komunikasi efektif, (3) pengelolaan konflik, dan (4) kerja tim. Mata pelatihan untuk mengefektifkan peranan administrator adalah aplikasi program komputer untuk administrasi sekolah dan delapan SPN. Mata pelatihan untuk mengefektifkan peranan manajer adalah: (1) perencanaan program ketatausahaan, (2) teknik berorganisasi, (3) teknik memotivasi staf, (3) teknik koordinasi, (4) kepemimpinan tim, (5) teknik delegasi, (6) teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan administratif, (7) manajemen mutu berbasis sekolah, dan (8) teknik menilai kinerja staf. Mata pelatihan untuk mengefektifkan fungsi pelayanan prima adalah pelayanan prima

Sedangkan berkaitan dengan tenaga laboran yang mesti diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut ini;

- a. Laboran masuk dalam komponen pokok dari KBM
- b. Laboran minimal setingkat dengan tenaga administrasi, tidak dapat digantikan oleh tenaga administrasi, dengan jenjang pendidikan D3 dan mempunyai jabatan fungsional atau bahkan struktural
- c. Di SD diperlukan laboran yang bertugas di satu laboratorium/gudang penyimpanan berbagai sarana peraga untuk kepentingan peragaan.
- d. Di SLTP minimal ada 3 laboran (Fisika, Biologi, dan Kimia) serta 1 teknisi computer
- e. Di SMU ada 7 laboran + 1 kepala/koordinator laboran.
- f. Diperlukan pendidikan khusus laboran setara D3 yang kurikulumnya disusun khusus sehingga mencakup masing-masing kompetensi labnya. (Kimia, Fisika, matematika, Biologi, Bahasa, Kesenian, Komputer

DAFTAR PUSTAKA

- Zamroni. 2003. *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan*. Nasional.Jakarta.Cemerlang.
- Abdul Mujib, Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya)*, ttp, Trigenda Karya,1993.
- Rosyadi, Khoiron, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Tohirin, M.S., *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. dalam pdf, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- <http://adzelgar.wordpress.com/2009/02/02/tenaga-kependidikan/31/03/2012>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kependidikan/31/03/2012
- <http://novanardy.blogspot.com/2010/03/ implementasi-undang-undang-guru-dan.html/31/03/2012>
- <http://tendik.org/content/view/670/91/31/03/2012>

-
- [1]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 12.
- [2]Ramayulis, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 19.
- [3]Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 210.
- [4]Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hal.

REORIENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Muhammad Imanulloh

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten
Email: imanaryadi12@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah titik awal jawaban atas tuntutan reformasi sistem pendidikan nasional dari sentralistik kepada desentralistik, maka negara harus menata ulang sistem penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan keunggulan masing-masing daerah yang selama ini kurang terakomodasi. Berangkat dari amanat undang-undang Sisdiknas tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, mulai dari tingkat pendidikan yang terendah sampai dengan yang tertinggi sekalipun. Sejumlah problematika muncul, mulai dari kesanggupan pendanaan daerah yang tidak sama, kewenangan pengangkatan guru yang diambil oleh pemerintah daerah, pemeliharaan sarana-prasarana sampai kepada kualitas hasil belajar siswa yang masih memperhatikan, belum lagi permasalahan politik yang mempengaruhi birokrasi di daerah termasuk pendidikan, banyak guru yang dilibatkan ataupun terlibat dalam politik praktis dalam pemilihan kepala daerah, kalau menang akan meminta atau diberi jabatan lain, sebaliknya kalau kalah guru akan dimutasikan, sehingga permasalahan desentralisasi selalu bermunculan, kesan yang ada sekarang desentralisasi dianggap menjadi permasalahan dalam duania pendidikan Indonesia.

Kata kunci: reorientasi, kebijakan, pendidikan, nasional

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu fenomena yang penting dalam mempengaruhi sistem pendidikan Nasional suatu Bangsa, termasuk Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, fenomena Desentralisasi akan berpengaruh

dalam Aperencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, penganggaran pendidikan sampai kepada evaluasi hasil belajar dan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.

Banyak alasan yang pro maupun yang kontra Desentralisasi, mulai dari persoalan peningkatan efisiensi manajerial dan tata kelola pemerintahan sampai kepada alasan pemerataan tenaga pendidik dan kesempatan belajar, hingga desentralisasi dianggap solusi yang tepat dalam reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan melalui pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah dewasa ini akan sangat menentukan sosok dan kinerja sistem pendidikan nasional di masa depan. Tujuan pertama reformasi pendidikan adalah membangun suatu sistem pendidikan nasional yang lebih baik, lebih mantap, dan lebih maju dengan mengoptimalkan dan memberdayakan potensi daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah titik awal jawaban atas tuntutan reformasi sistem pendidikan nasional dari sentralistik kepada desentralistik, maka negara harus menata ulang sistem penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan keunggulan masing-masing daerah yang selama ini kurang terakomodasi. Berangkat dari amanat undang-undang Sisdiknas tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, mulai dari tingkat pendidikan yang terendah sampai dengan yang tertinggi sekalipun.

Desentralisasi juga akan sangat membantu memperjelas alur akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi akan memungkinkan mobilisasi sumber daya ditingkat lokal, diasumsikan adanya tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah daerah, meskipun tetap dibiayai oleh pemerintah pusat.

Sejumlah problematika muncul, mulai dari kesanggupan pendanaan daerah yang tidak sama, kewenangan pengangkatan guru yang diambil oleh pemerintah daerah, pemeliharaan sarana-prasarana sampai kepada kualitas hasil belajar siswa yang masih memperhatikan, belum lagi permasalahan politik yang mempengaruhi birokrasi di daerah termasuk pendidikan, banyak guru yang dilibatkan ataupun terlibat dalam politik praktis dalam pemilihan kepala daerah, kalau menang akan meminta atau diberi jabatan lain, sebaliknya kalau kalah guru akan dimutasikan, sehingga permasalahan desentralisasi selalu bermunculan, kesan yang ada sekarang desentralisasi dianggap menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam kondisi tersebut dituntut penyelesaian masalah pendidikan dilakukan secara menyeluruh, integratif dan terorganisir, untuk itu perlu langkah-langkah segera, terencana dan menyeluruh agar dapat keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada di era globalisasi yang penuh kompetitif.

PEMBAHASAN

A. Pendidikan di Indonesia

Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia yang termuat dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan tersebut memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk

kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya yang membawa konsekuensi, guru harus memahaminya dan memiliki standar pelayanan, standar proses maupun standar pengelolaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Mencermati kondisi Pendidikan Indonesia dewasa ini, belum adapat memenuhi harapan, sistem pendidikan yang disusun masih sulit untuk diimplentasikan di lapangan, desentralisasi pendidikan yang diterapkan masih belum berjalan, pemerataan guru masih menjadi permasalahan, sarana-prasana pendidikan jauh dari ideal, hasil Ujian Nasional masih dianggap kebohongan nyata dunia pendidikan, sehingga sampai sekarang nilai hasil Ujian nasional nyaris tidak bermanfaat, hanya sebatas melaksanakan tuntutan pemerintah yang terkesan bagi-bagi anggaran saja tetapi tidak memenuhi tuntutan masyarakat untuk perbaikan-perbaikan sarana pendidikan lainnya bukan tuntutan ujian Nasional, mengapa biaya Ujian nasional tidak digunakan untuk memperbaiki gedung sekolah, atau pengadaan buku pelajaran, maupun kegiatan yang langsung pada upaya peningkatan mutu pembelajaran, mengapa pemerintah tidak prihatin dengan kondisi sarana-prasana, proses dan pengelolaan pendidikan yang masih carut marut ketimbang menghabiskan dana untuk penyelenggaraan Ujian Nasional, atau memang ciri khas pemerintah Indonesia yang gemar membangun citra saja ketimbang peka dengan realita, ternyata Ujian nasional menghasilkan mutu lulusan yang suka berbohong, selalu membuat resah masyarakat, mengambil jalan pintas dalam berurusan, jauh dari watak atau karakter warga yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri maupun bertanggung jawab.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka perlu adanya reformasi pendidikan di Indonesia, harus ada komitmen yang tinggi dari setiap unsur yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut, perlu adanya implementasi tujuan pendidikan nasional di lapangan, perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam pemerataan kesempatan belajar siswa dan perlu adanya peningkatan kompetensi guru dalam menyampaikan mata pelajaran dengan berbagai metode dalam penyampaian.

B. Kualitas pendidikan Indonesia di era desentralisasi

Pemerintah sebagaianggung jawab pendidikan nasional telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui proses pendidikan, maka pemerintah telah berupaya mewujudkannya melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan materi bahan ajar, serta pelatihan bagi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya.[1]

Reformasi manajemen pendidikan yang ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan mutu, efisiensi, efektifitas dan kinerja madrasah dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Konsekuensi logis dari reformasi manajemen pendidikan (MBS), menuntut peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, dibentuklah suatu badan yang menggantikan keberadaan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) yaitu Komite Madrasah melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

nomor: 044/U/2002. Penggantian nama lembaga formal ini, didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh terhadap madrasah. Lebih jauh, lembaga ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi serta sebagai pengontrol dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Selama ini, partisipasi masyarakat dari data yang diungkap menunjukkan hanya sekitar 20 % saja partisipasi masyarakat dari keseluruhan masyarakat Indonesia, yang tergambar dari APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan dari tahun ke tahun cenderung naik diharapkan dimasa mendatang tidak terjadi kesenjangan antara sekolah dan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah/madrasah dan hubungan komunitas masyarakat dengan pemerintah kurang dekat.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah/madrasah), keluarga, dan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa orang tua siswa dan masyarakat (komite sekolah/madrasah) mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, turut memberikan sumbangan pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif, serta memberikan bantuan berupa materi untuk kemajuan sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh H.B. Siswanto[2] bahwa orang tua siswa dapat memberi energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi dan luhur, serta meningkatkan kegairahan bersama. Sementara itu Hamzah B. Uno[3] mengatakan bahwa orang tua siswa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Pendapat ini, mengisyaratkan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di madrasah dan tersedianya sarana prasarana, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan, keluarga, dan masyarakat.

Harus diakui bahwa yang menjadi pokok permasalahan keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia salah satu indikatornya adalah kinerja manajemen (praktek manajerial). Perilaku manajerial ini, ditenggarai sebagai salah satu faktor yang memiliki potensi dalam mempengaruhi dunia pendidikan yang meliputi berbagai sumber daya pendidikan yang terkait dengan mutu output yang dihasilkan. Karenanya, manajemen pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari kemampuan manajer (kepala madrasah) dalam menggerakkan segala sumber daya yang ada menuju arah yang telah disepakati bersama secara sistematis, efisien, dan efektif melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengevaluasian.

Perlu juga dicatat bahwa upaya peningkatan mutu pada alam desentralisasi membawa konsekuensi logis pada peningkatan profesionalitas guru, kepala sekolah/madrasah, dan administrator pendidikan sangat bergantung kepada kemauan dan keputusan-keputusan politik pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengangkatan pimpinan sekolah/madrasah hanya didasarkan pada nepotisme, padahal sangat disadari bahwa seorang manajer/pemimpin, kepala madrasah adalah salah seorang penentu keberhasilan mutu pendidikan. Keberhasilan pendidikan di madrasah sangat tergantung kepada kualitas kepemimpinan kepala sekolah/madrasah yang memegang peranan penting dalam berbagai kegiatan di madrasah. Perlu diperhatikan juga bahwa kepala sekolah/madrasah harus disertai dengan beberapa kualifikasi yang melekat pada tugas dan fungsinya, yaitu profesionalisasi dalam pekerjaannya, "...bahwa usaha peningkatan kemampuan manajerial sekolah harus didukung oleh profesionalisasi pekerjaan administrasi sekolah yang membuat para pejabatnya benar-benar menjadi administrator karir" [4].

Sebagai bahan renungan, bahwa untuk mengimplementasi reformasi manajemen dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, kepala madrasah bukan sekedar pelaksana atas berbagai kebijakan, melainkan sebagai penanggung jawab penuh secara profesional dalam manajemen sekolah/madrasah, demi tercapainya prestasi sekolah/madrasah yang diharapkan, karena "...sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit, tidak lepas dari peran seorang kepala sekolahnya. Pada umumnya sekolah tersebut dipimpin oleh seorang kepala sekolah/ madrasah yang efektif" [5].

C. Solusi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia

Pentingnya perbaikan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran guna mencapai pendidikan yang berkualitas, karena langkah-langkah perbaikan harus bersifat menyeluruh dan saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah/madrasah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah/madrasah dalam school based quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh sekolah/madrasah, terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau kognitif dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya: Nilai UN oleh KKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah/madrasah baik yang sudah ada patokannya maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah/madrasah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses

pendidikan tahun berikutnya. Dalam hal ini RAPBS/M harus merupakan penjabaran dari target kualitas/mutu yang ingin dicapai dan skenario bagaimana mencapainya.

Agar perbaikan atau target mutu dapat dicapai dapat dilakukan proses penjaminan kualitas/mutu. Penjaminan kualitas adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Kebutuhan tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan pelanggan. Penjaminan kualitas biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yakni;[6]

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan;
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan;
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain);
4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Hal ini, bermakna agar sekolah/madrasah melakukan sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali (right first time), melalui perbaikan berkesinambungan (continous improvement) dan memotivasi karyawan. Melalui penjaminan kualitas seluruh konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan dapat berhasil mencapai sasaran melalui bukti-bukti dalam membangun kepercayaan dan berfungsi secara

efektif. Hal yang tidak kalah penting dalam melaksanakan penjaminan kualitas/mutu ini adalah komitmen yang kuat dari bawah ke atas semua pihak. Artinya komitmen merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Setiap pilar tergantung pada pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya yang lain juga lemah.

Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah/madrasah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah/madrasah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat rencana Penyusunan basis data dan profil sekolah/madrasah lebih presentatif, akurat, valid dan secara sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan;
2. Berdasarkan analisis, sekolah/madrasah harus mengidentifikasi kebutuhan sekolah/madrasah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai.
3. Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah/madrasah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannya). Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun itu dan tahun-tahun yang

akan datang. Perencanaan program sekolah/madrasah ini harus mencakup indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pendidikan. Penyusunan dilakukan bersama-sama antara sekolah/madrasah, orang tua dan masyarakat. Karena fokus kita dalam mengimplementasikan konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka program yang disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum nasional yang telah ditetapkan, langkah untuk menyampaikannya di dalam proses pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya.

4. Prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam rangka waktu satu tahun program sekolah/madrasah, oleh karena itu sekolah/madrasah harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci kebijakan dan prioritas. Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan sebagai strategi pelaksanaan perencanaan yang harus memenuhi tujuan esensial, yaitu : (i) mampu mengidentifikasi perubahan pokok di sekolah/madrasah sebagai hasil dari kontribusi berbagai program sekolah/madrasah dalam periode satu tahun, dan (ii) keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan tersebut harus menyakinkan guru dan staf lain yang berkepentingan (yang seringkali merasakan tertekan karena perubahan tersebut dirasakan harus melaksanakan total dan segera) bahwa walaupun perubahan besar diperlukan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa, tetapi mereka disediakan waktu yang representatif untuk melaksanakannya, sementara urutan dan logika pengembangan juga telah disesuaikan. Aspek penting dari strategi perencanaan ini adalah program dapat dikaji ulang untuk setiap periode tertentu dan

perubahan mungkin saja dilakukan untuk penyesuaian program di dalam kerangka acuan perencanaan dan waktunya.

5. Melakukan evaluasi untuk menyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya. Karena fokus kita adalah mutu siswa, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan tujuan dan kegiatan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektifitas dan efisiensi dari program sekolah/madrasah dan kebijakan yang terkait dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Seringkali evaluasi tidak selalu bermanfaat dalam kasus-kasus tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga diperlukan informasi lain yang akan dipergunakan untuk pembuatan keputusan selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Demikian aktifitas tersebut terus menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan, harus ada tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, jangan sampai problematika yang ada tidak diatasi dengan segera, menumpuk lama kelamaan sulit dan bertambah rumit.

PENUTUP

Desentralisasi Pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan baik, sehingga masih sulita menghasilkan hasil pendidikan yang berkualitas dan belum mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Perlu adanya komitmen untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas dari semua unsur dan pelaku pendidikan, baik pemerintah, sekolah yang didukung oleh partisipasi aktif

masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan. Untuk menghasilkan kualitas pendidikan di Indonesia, perlu adanya reformasi pendidikan di Indonesia, harus ada kejelasan dan pertanggung jawaban yang jelas, dan adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyasa. E, Manajemen Berbasis Sekolah , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) Mulyasa, E, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, Jakarta: Tth H.B.Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
- Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998)
- Sanusi, Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan, (Bandung: PPS IKIP Bandung, 1990)
- Soebagio Atmodiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT. Ardadizya-Jaya, 2000)
- Tjiptono Fandy & Diana Anastasia, Total Quality Management, (Yogyakarta : Andi, 2003)

POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ASPEK MASYARAKAT (ORANG TUA MURID)

Setia Winata

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten
Email: setiawinata1407@gmail.com

Abstrak

Fungsi pendidikan dalam masyarakat yaitu menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda, dan memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Peralihan bentuk pendidikan jalur luar sekolah ke jalur pendidikan sekolah (formal) memerlukan “kerja sama” antara orang tua dan sekolah (pendidik). Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Begitu juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah (pendidik) yang menggantikan tugasnya selama ini di ruangan sekolah.

Kata kunci: politik, kebijakan, pendidikan, masyarakat

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan hidup keagamaan, karena sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orangtuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Selain peran dari keluarga ada juga peran pendidikan sekolah dan masyarakat, karena itu semua sangat berkaitan erat, karna sama-

sama membimbing dan mendidik. Seperti pendidikan sekolah, pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang disekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan dengan mengikuti sarat-sarat yang ketat dan jelas. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupan. Adapun fungsi pendidikan dalam masyarakat yaitu menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda, dan memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban.

PEMBAHASAN

A. PERANAN KELUARGA

Dalam memahami suatu keluarga, keluarga memiliki beberapa pengertian. Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dengan demikian, dapat diambil suatu intisari pengertian keluarga yaitu:

- 1) keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
- 2) hubungan sosial diantara keluarga relative tetap yang didasarkan pada ikatan darah, perkawinan atau adopsi.
- 3) hubungan antar keluarga dijiwai oleh susunan afeksi dan rasa tanggung jawab.

- 4) fungsi keluarga adalah memulihkan, merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup (system sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai satu kesatuan hidup bersama (system sosial), keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan.

Sementara itu, yang berkenaan dengan keluarga menyediakan situasi belajar, dapat dilihat bahwa bayi dan anak-anak sangat bergantung kepada orang tua, baik karena keadaan jasmaniahnya maupun kemampuan intelektual, sosial, dan moral. Bayi dan anak belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh orang tua.

Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai berikut :

1. Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri, berjalan, berdoa, sungguh-sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi.
2. Sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi emosional anak.

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa di pikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah daging nya, kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Maka sebagai tanggung jawab pendidikan dapat di limpahkan kepada orang lain, yaitu melalui sekolah.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu di sadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

1. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk di laksanakan karena si anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah dan rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan Agama sesuai dengan ketentuan Allah swt, sebagai tujuan akhir hidup muslim.

Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina aanak secara kontinu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah di dasri oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah.

Tugas utama keluarga pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.

B. KERJA SAMA ANTARA KELUARGA DENGAN SEKOLAH

Di dalam UU nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 ayat (4) dinyatakan bahwa: Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan

yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Sementara itu, dalam GBHN 1993 dinyatakan: “Pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi baik antarberbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, maupun antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta anatardaerah. Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional” .

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah hanyalah pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Peralihan bentuk pendidikan jalur luar sekolah ke jalur pendidikan sekolah (formal) memerlukan “kerja sama” antara orang tua dan sekolah (pendidik). Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Begitu juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah (pendidik) yang menggantikan tugasnya selama ini di ruangan sekolah. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat akhir-akhir ini seringkali terjadi tindakan-tindakan kurang terpuji dilakukan anak didik, sementara orang tua seolah tidak mau tahu, bahkan cenderung menimpakan kesalahan kepada sekolah.”

Orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya, yaitu dengan memperhatikan pengalaman-pengalamannya dan menghargai segala usahanya. Begitu juga orang tua harus menunjukan kerjasamanya dalam mengarahkan cara anak belajar di rumah, membuat pekerjaan rumahnya, tidak disita waktu anak dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, orang tua harus berusaha memotivasi dan membimbing anak dalam belajar.

Berdasarkan hasil riset bahwa pekerjaan guru (pendidik) di sekolah akan lebih efektif apabila dia mengetahui latar belakang dan pengalaman anak didik di rumah tangganya. Anak didik yang kurang maju dalam pelajaran,

berkat kerja sama orang tua anak didik dengan pendidikan banyak kekurangan anak didik yang dapat diatasi.lambat laun juga orang tua menyadari bahwa pendidikan atau keadaan lingkungan rumah tangga dapat membantu atau menghilangkan kesukaran anak di sekolah.

Apa-apa yang dibawa anak didik dari keluarganya, tidak mudah mengubahnya. Kenyataan ini harus benar-benar disadari dan diketahui oleh pendidik. Pada dasarnya cukup banyak cara yang dapat ditempuh untuk menjalin kerja sama antara keluarga dengan sekolah. Berikut ini beberapa contohnya.

1. Adanya Kunjungan Ke Rumah Anak Didik

Pelaksanaan kunjungan ke rumah anak didik ini berdampak sangat positif, di antaranya :

- a. Kunjungan melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu memerhatikan dan mengawasinya.
- b. Kunjungan tersebut memberi kesempatan kepada si pendidik melihat sendiri dan mengobservasi langsung cara anak didik belajar, latar belakang hidupnya, dan tentang masalah-masalah yang dihadapinya dalam keluarga.
- c. Pendidik berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada orang tua anak didik tentang pendidikan yang baik, cara-cara menghadapi masalah-masalah yang sedang dialami anaknya (kalau anaknya bermasalah), dan sebagainya.
- d. Hubungan antara orang tua dengan sekolah akan bertambah erat.
- e. Kunjungan dapat memberikan motivasi kepada orang tua anak didik untuk lebih terbuka dan dapat bekerja sama dalam upaya memajukan pendidikan anaknya.

- f. Pendidikan mempunyai kesempatan untuk mengadakan interview mengenai berbagai macam keadaan atau kejadian tentang sesuatu yang ingin ia ketahui.
- g. Terjadinya komunikasi dan saling memberikan informasi tentang keadaan anak serta saling memberi petunjuk antara guru dengan orang tua.

2. Diundangnya Orang Tua Ke Sekolah

Kalau ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang memungkinkan untuk dihadiri oleh orang tua, maka akan positif sekali artinya bila orang tua diundang untuk datang ke sekolah. Kegiatan-kegiatan dimaksud umpamanya class meeting yang berisi perlombaan-perlombaan yang mendemonstrasikan kebolehan anak dalam berbagai bidang, pameran hasil kerajinan tangan anak, pemutaran film pendidikan, dan sebagainya. Seharusnya undangan terhadap orang tua ke sekolah ini minimal dilaksanakan satu kali dalam setahun.

3. Case Conference

Case Conference merupakan rapat atau konferensi tentang kasus. Biasanya digunakan dalam bimbingan kenseling. Peserta konferensi ialah orang yang betul-betul mau ikut membicarakan masalah anak didik secara terbuka dan sukarela, seperti orang tua anak didik, guru-guru, petugas bimbingan yang lain, dan para ahli yang ada sangkut pautnya dengan bimbingan seperti social worker dan sebagainya. Konferensi biasanya dipimpin oleh orang yang paling mengetahui persoalan bimbingan kenseling, khususnya tentang kasus dimaksud.

4. Badan Pembantu Sekolah

Badan pembantu sekolah ialah organisasi orang tua murid atau wali murid dan guru. Organisasi dimaksud merupakan kerja sama yang paling

terorganisasi antar sekolah atau guru dengan orang tua murid. Sampai sekarang, organisasi ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama karena disesuaikan dengan perkembangan situasi pendidikan dan masyarakat pada mulanya organisasi ini bernama perkembangan Orang tua Murid dan Guru (POMG), kemudian berubah menjadi persatuan Orang Tua Murid (POM, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), dan sekarang dikenal dengan istilah Komite Sekolah.

5. Mengadakan Surat Menyurat antara Sekolah dan Keluarga

Surat-menyurat ini diperlukan terutama pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak didik, seperti surat peringatan dari guru kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat, sering membolos, sering berbuat keributan, dan sebagainya. Surat-menyurat ini juga sebenarnya sangat baik bila dilakukan oleh guru tua kepada guru atau langsung ke kepala sekolah/ madrasah untuk memantau keadaan anaknya di sekolah.

6. Adanya Daftar Nilai atau Raport

Raport yang biasanya diberikan setiap catur wulan kepada para murid ini dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua. Sekolah dapat memberi surat peringatan atau memintah bantuan orang tua bila hasil raport anaknya kurang baik, atau sebaliknya jika anaknya mempunyai keistimewaan dalam suatu mata pelajaran, agar dapat lebih giat mengembangkan bakatnya atau minimal mampu mempertahankan apa yang sudah dapat diraihny.

Demikianlah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjalin kerja sama antara sekolah dengan keluarga. Semua bentuk kerja sama tersebut sangat besar manfaat dan artinya dalam memajukan pendidikan sekolah pada umumnya, dan anak didik pada khususnya.

C. HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN SEKOLAH

Pendidikan tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, sekolah, dan guru saja, tapi juga merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Masyarakat diharapkan peran sertanya dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan, terutama dalam mendidik moral, norma, dan etika yang sesuai dengan agama dan kesepakatan masyarakat. Siswa belajar di sekolah dalam waktu terbatas, sedangkan waktu terbanyak ada di rumah dan masyarakat.

Masyarakat dapat diartikan sebagai :”A community is a group or a collection of groups that in habits a locality”. Atau yang disebut dengan satu kelompok atau sekumpulan kelompok yang mendiami suatu daerah.

Pada dasarnya masyarakat adalah perwujudan kehidupan bersama manusia, dimana didalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antara hubungan dan interaksi. Di dalam masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku bangsa, kebudayaan, agama, lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk.

Sementara dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi. Sementara itu, dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis.

Antara masyarakat dengan pendidikan punya keterkaitan dan saling berperan. Apalagi pada zaman sekarang ini, setiap orang selalu menyadari akan peranan dan nilai pendidikan. Oleh karena itu, setiap

warga masyarakat bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina pendidikan.

Sedangkan sekolah merupakan bentuk pendidikan formal bagi manusia yang didalamnya mengembangkan kemampuan manusia baik dari akademik maupun non akademik. Oleh sebab itu, tiap sekolah memiliki program tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan visi misi sekolah. Program-program ini, selain dikelola dengan baik, memerlukan pula dukungan dari masyarakat.

Istilah “sekolah” sebagai suatu institusi atau lembaga atau lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal, informal, maupun nonformal yang merupakan sarana melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sedangkan “masyarakat” dalam konteks sekolah adalah warga atau individu yang berada disekolah atau sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung atau tak langsung terhadap manajemen sekolah.

“Menurut Mohammad Noor Syam bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif. Masyarakat maju karena pendidikan dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula”.

Sementara itu, Sanafiah Faisal mengemukakan bahwa hubungan antara sekolah (pendidikan) dengan masyarakat paling tidak, bisa dilihat dari dua segi berikut.

1. Sekolah sebagai patner masyarakat didalam melaksanakan di dalam melaksanakan fungsi pendidikan.
2. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya.
- a. Pentingnya Hubungan Masyarakat dan Sekolah.

Hubungan antara masyarakat dan sekolah meliputi :

- a) Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat.
- b) Hak hidup dan kelangsungan hidup bergantung pada masyarakat
- c) Sekolah adalah lembaga sosial berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
- d) Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.
- e) Masyarakat adalah pemilik sekolah, karena masyarakat membutuhkannya.

Pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat :

- a) Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang harusnya mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat.
- b) Sekolah haruslah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat tempat sekolah itu didirikan.
- c) Sebaiknya, masyarakat harus membantu dan bekerjasama dengan sekolah agar apa yang diperoleh dan dihasilkan sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat.
- d) Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam memecahkan permasalahan pendidikan.
- e) Partisipasi, dukungan dan bantuan secara konkrit dari masyarakat baik berupa financial, material untuk kelancaran sekolah.

b. Tujuan Hubungan Masyarakat dan Sekolah

Tujuan hubungan masyarakat dan sekolah dapat dikelompokkan menjadi tiga tujuan pokok, yaitu :

1. Mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak

Untuk mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak hendaknya personil sekolah mengetahui benar-benar kondisi masyarakat lingkungan hidup anak-anak yang sangat penting bagi program pendidikan.

2. Meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan masyarakat

Didalam masyarakat yang demokratis, seyoginya dapat menjadikan dirinya sebagai pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan-perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi, kebudayaan, teknologi dan sebagai ke tingkat yang tinggi.

3. Mengembangkan pengertian antusiasme dan partisipasi masyarakat

Pengertian antusiasme dan partisipasi masyarakat tersebut sangat penting, apalagi bagi masyarakat kita yang pada umumnya masih belum menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan anak-anak adalah juga tugas dan tanggung jawab masyarakat disamping sekolah dan pemerintah.

- c. Jenis- Jenis Hubungan Masyarakat Dan Sekolah

Banyak orang berpendapat bahwa hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat hanyalah dalam hal mendidik anak belaka. Padahal hubungan antara sekolah dan masyarakat itu mengandung arti yang sangat luas. Adapun hubungan antara sekolah dan masyarakat itu sebagai berikut :

1. Hubungan edukatif, ialah hubungan kerja sama dalam hal mendidik murid (anak) antara guru disekolah dan oran tua didalam keluarga.
2. Hubungan cultural, ialah usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada.

3. Hubungan institusional, ialah hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi baik swasta maupun pemerintah. Dengan adanya hubungan ini, sekolah sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan materi kurikulum maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan program sekolah.

Selain jenis-jenis hubungan masyarakat dan sekolah, ternyata ada manfaat dari hubungan masyarakat dan sekolah, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi masyarakat

- 1) Masyarakat mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah
- 2) Masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pendidikan dapat mengajukan aspirasinya terhadap sekolah.
- 3) Masyarakat dapat memberikan kritikan dan saran yang berguna untuk sekolah apabila terdapat program, keputusan atau tindakan sekolah yang tidak sesuai dengan harapan dan keputusan masyarakat.

b. Bagi sekolah

- 1) Sekolah dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan baik dari segi tenaga pendidik maupun dari fasilitas pendidikan karena sekolah mendapat penilaian dan control langsung dari masyarakat.
- 2) Sekolah dapat menyampaikan-menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami sekolah yang memerlukan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikannya.
- 3) Sekolah dapat member pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep-konsep pendidikan yang perlu masyarakat pahami agar

tidak terjadi kesalahpahaman konsep antara sekolah dan masyarakat.

- 4) Sekolah dapat memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar bagi peserta didik.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah. Peran serta masyarakat itu tidak hanya berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu. Hubungan masyarakat dengan sekolah adalah kerjasama antara masyarakat dengan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, dimana sekolah memiliki tanggung jawab memberi pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan, program, dan kebutuhan sekolah. Sebaliknya masyarakat memiliki tanggung jawab menyumbangkan sumber daya dalam hubungan tersebut. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan dua belah pihak.

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki sekolah. Karena sekolah hidup ditengah-tengah masyarakat, melayani masyarakat dan di hidupi masyarakat,

sebaliknya masyarakat mengambil manfaat berupa output sekolah, berupa tenaga lulusan yang memiliki kualifikasi tertentu. Sekolah harus mampu menampung aspirasi masyarakat karena masyarakatlah pemasok sekaligus pemakai output sekolah. Kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat akan menguntungkan keduanya. Sekolah semakin eksis berkat dukungan masyarakat, dan masyarakat memetik manfaat berupa output berkualitas.

D. PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, bahwa masyarakat merupakan lembaga ketiga sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya. Bagaimana kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, jangan diharapkan pendidikan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Apalagi bila dilihat dari materi yang digarap, jelas kegiatan pendidikan yang termasuk jalur sekolah, berisikan generasi muda yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk itu bahan apa yang akan diberikan kepada anak didik sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat dimana kegiatan pendidikan berlangsung.

Berikut ini adalah beberapa peran dari masyarakat terhadap pendidikan (sekolah) :

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.

2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
3. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung mesuem, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. Orang-orang yang punya keahlian khusus banyak sekali terhadap di masyarakat, seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter dan sebagainya.
5. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar.

Di samping buku-buku pelajaran, masyarakat member bahan pelajaran yang banyak sekali, antara lain seperti aspek alami industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan dan sebagainya.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa peran masyarakat sangatlah besar terhadap pendidikan sekolah. Untuk itu, sekolah perlun memanfaatkannya sebaik-baiknya, paling tidak bahwa pendidikan harus dapat mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

1. Dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat, anak didik akan mendapatkan pengalaman langsung (first hand experience) sehingga mereka dapat memiliki pengalaman yang konkret dan mudah diingat.
2. Pendidikan membina anak-anak yang berasal dari masyarakat, dan akan kembali ke masyarakat.

3. Di masyarakat banyak sumber pengetahuan yang mungkin guru sendiri belum mengetahuinya.
4. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan orang-orang yang terdidik dan anak didik pun membutuhkan masyarakat.

PENUTUP

Keluarga merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosial. Disamping itu juga sebagai tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi.

Kerja sama antara keluarga dan sekolah sangat dibutuhkan, karena tidak mungkin keluarga dapat mendidik anak secara detail dan rinci, sebab jika orang tua saja yang mendidik anak akan ketinggalan pengetahuan, baik dari intelektualnya maupun sosialnya. Perlu kita ketahui pendidikan di sekolah akan lebih efektif karena sekolah memiliki program tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan visi misi sekolah.

Oleh sebab itu dengan adanya kerja sama dari sekolah, masyarakat, guru dan keluarga khususnya di bidang pendidikan peserta didik, maka akan menghasilkan anak didik yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik tetapi juga mampu hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hafid Anwar dkk,2013,Konsep Dasar Ilmu Pendidikan,PT Alfabeta:
Bandung.

Hasbulloh,2011, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada:
Jakarta.

Kurniawan, 2011, pemikiran pendidikan, LP2 STAIN CURUP : Curup .

Nuzuar, 2012, Pengantar Ilmu Pendidikan, LP2 STAIN CURUP: Curup.

<http://indonesia-admin.blogspot.com/2010/02/kerja-sama-keluarga-sekolah.html>

<http://teratakhijau3.blogspot.com/2013/01/konsep-hubungan-sekolahdan-masyarakat1813.html>